

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata), dalam pemenuhannya manusia harus berusaha dan bekerja keras secara seimbang untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut. Allah SWT memerintah manusia untuk memanfaatkan dan memproduksi sumber daya alam yang ada di jagad raya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mewujudkan maslahat dan menghindari *mudharat*. Dalam menggapai kebutuhan hidup, seorang muslim harus menghindarkan hal-hal yang dapat *me-mudhorat*-kan (merugikan) orang lain, karena tujuan utama ajaran Islam adalah terwujudnya kebaikan (maslahat) dalam hidup manusia, baik secara perorangan maupun sosial, jasmani maupun rohani, dunia maupun akhirat.

Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi dengan menjaga dan memanfaatkan segala sumber daya yang telah ada sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dalam hal ini manusia bertindak sebagai *manager of resources* yang menerima amanah dari Tuhan, sementara sumber daya alam sebagai *stakeholder* pembangunan yang harus dikelola untuk keperluan manusia. Hal tersebut merupakan perintah Allah yang tertuang dalam ayat-ayat al-Qur'an di bawah ini.

❖ وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ
ثُمَّ تَوَّابًا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Wa ilā šamūdā akhahum šālihā(n), qāla yā qaumi ‘budullāha mā lakum min ilāhin gairuh(ū), huwa ansya’akum minal arđi wasta’marakum fīhā fastagfirūhu summa tūbū ilaih(i), inna rabbī qarībun mujiib(un)

Artinya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”. QS. Hud (11): 61 (Departemen RI (2012: 228)).

Ayat di atas mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama, maka *al-wujud* atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan (al-Jassas dalam Asmuni: 2003). Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya (al-Quthubi dalam Asmuni: 2003).

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, atau suatu proses

yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meingkat dalam jangka panjang.

Ekonomi pembangunan pada dasarnya telah melewati tiga fase yang berbeda, fase pertama, adalah ekonomi pembangunan klasik yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja kapitalisme dengan selogannya yang terkenal *laisse faire* (Chapra, 2000: 28). Fase ini bertahan lebih kurang satu abad sejak publikasi *The wealth of Nation* karya Smith tahun 1776 (Todaro, 1989:7).

Fase kedua, dimulai setelah perang dunia kedua da ketika sejumlah negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya. Berdasarkan pada hal itu, banyak negara-negara yang baru merdeka, maka analisis masalah yang berkenaan dengan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian (Hegen, 1972: 36). Pada fase ini fokus perhatian berpindah dari ekonom liberalisme klasik kepada Neo-klasik. Strategi yang dipegang adalah ketergatangan yang lebih kecil kepada pasar dan peranan yang lebih besar dari pemerintahan dalam perekonomian. Kapitalisme *laissez faire* telah kehilangan peran ketika itu, akibat peristiwa *Great Depression* (1929-1932) (Sukirno, 1999:413-414). Ekonom yang sangat berperan dalam fase ini adalah Keynes dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* yang diterbitkan tahun 1936. Pada fase inilah ekonomi Keynesys dan sosialisasi memperoleh momentum di dunia barat.

Fase ketiga memiliki fokus yang berbeda dengan fase kedua. Fase ketiga ini perhatian ekonomi pembangunan cenderung anti kekuasaan (negara) dan kembali pro kepada kebebasan pasar, fase ini terjadi mulai tahun 1970-an, yaitu

ketika pelaksanaan strategi Keynes dan sosialis mulai melemah. Pada fase ini ekonomi neo-klasik mulai “*comeback*” dan menjadi paradigma yang dominan (Chapra, 2000:28). Mereka berkeyakinan bahwa liberalisasi pasar dengan pengurangan peran pemerintah dalam bidang ekonomi adalah sangat penting untuk menyelesaikan masalah negara berkembang, fase ini juga dianggap sebagai era kebangkitan liberalisme dan ekonomi neo-klasik (Chapra, 2000: 28).

Ketiga fase tersebut menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpastian dalam program pembangunan di negara-negara berkembang (Pertadireja, 1984: 213-219), khususnya di negara-negara muslim. Inkosistensi tersebut melahirkan analisis dan resep kebijakan yang bertentangan dan ini sangat membahayakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang akan melaksanakan pembangunan dengan model barat mengalami kebingungan karena pertentangan-pertentangan konsep antara neo-klasik ala Keynes dengan liberalisme klasik (ekonomi pasar yang mereduksi peran negara dalam ekonomi) yang diajarkan Smith. Kebingungan negara-negara berkembang itu juga dipengaruhi oleh konsep-konsep pembangunan dari negara-negara yang menerapkan sistem sosialis.

Berkaitan dengan hal itu, maka tugas yang dihadapi negara berkembang sangat rumit, negara-negara berkembang tersebut tidak hanya harus mengembangkan ekonomi dengan cara yang tepat dengan tingkat efisien dan keadilan yang tinggi dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga harus mengubah ketidakseimbangan pembangunan yang ditimbulkan oleh resep yang salah tersebut. Semua aliran ekonomi tersebut, baik klasik, neo-klasik, dan sosialis,

semuanya lahir dari pandangan dunia *enlightenment*, pendekatan mereka untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan analisis mereka tentang problem-problem manusia adalah sekuler (Chapra, 2000:29). Mereka lebih mementingkan konsumsi dan pemilik materi sebagai sumber kebahagiaan manusia. Mereka tidak mengindahkan peranan nilai moral dalam reformasi individu dan sosial, serta terlalu berlebihan menekankan peranan pasar atau negara. Mereka tidak memiliki komitmen kepada persaudaraan (*brotherhood*), keadilan sosio-ekonomi dan tidak pula memiliki mekanisme *filter* nilai-nilai moral yang disetujui masyarakat.

Konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam seperti yang digariskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah dan juga yang dikemukakan oleh para ulama dan sarjana dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh pemikiran ekonomi barat, khususnya dalam basis fundamentalnya. Tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan yang kompresif dan holistik baik di dunia dan di akhirat. Ahmad (2000) dalam Rafsanjani (2014:5), menggaris bawahi dasar-dasar filosofis pendekatan Islam dalam pembangunan adalah: *Tauhid, Rubiyyah, khlafah, Tazkiyah*. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi akan memiliki karakter yang komprehensif dan mencakup aspek moral, spritual, dan material. Obyek dari pembangunan ekonomi adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan sistem nilai-nilai Islam melalui perluasan produksi yang bermanfaat, peningkatan kualitas hidup, keseimbangan pembangunan, pengembangan teknologi yang sejalan dengan kondisi negara-

negara muslim, dan pengurangan ketergantungan terhadap dunia luar serta integrasi yang lebih besar dari dunia muslim.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Persoalan tentang pencapaian pembangunan sejauh ini telah menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara, oleh sebab itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu *Human Development Index* (HDI) atau disebut juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia, namun keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial, adapun persoalannya adalah pencapaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Sehubungan dengan hal itu, timbul pertanyaan bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara komperhensif.

Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam

pembangunan menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya, dan keberadaan HDI yang ditawarkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) sebagai salah satu alat yang dapat di pakai untuk mengukur tingkat pembangunan manusia mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Teori dan konsep yang mendasari untuk membangun HDI tidak didasarkan pada *maqashid syariah*. Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI), yang mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam.

I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat (mencapai *falah*). Menurut Imam al-Syatibi, *masalah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*maal*). Kelima dimensi tersebut merupakan kebutuhan dasar di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya, kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna (P3EI: 2012, 5-6).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anto dalam *Intruduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries* (2009) dan Rafsanjani dalam *Analisis I-HDI di Indonesia* (2014), I-

HDI di hitung berdasarkan data yang menggambarkan kelima dimensi *maqashid syariah* tersebut. Untuk dimensi agama (*ad-dien*) indikator yang digunakan yaitu data angka kriminalitas dan angka partisipasi siswa sekolah agama . Dimensi jiwa (*an-nafs*) indikator yang dipakai yaitu data angka harapan hidup, semetara itu untuk dimensi intelektual (*al'-aql*) digunakan indikator yaitu data angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk dimensi keturunan (*an-nasl*) digunakan dua indikator yaitu data angka kelahiran total dan angka kematian bayi. Untuk dimensi harta (*al-maal*) maka digunakan gabungan dua indikator yaitu indikator kepemilikan harta oleh individu dan indikator distribusi pendapatan. Untuk indikator kepemilikan atas harta data yang dipakai yaitu pengeluaran perkapita riil disesuaikan, untuk indikator distribusi pendapatan digunakan data indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar. Data menunjukkan berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia beragama Islam ± 207 juta jiwa, seperti ditunjukkan dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama, Tahun 2010

NO	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	207.176.162	87,51
2	Kristen	16.528.513	6,98
3	Katolik	6.907.873	2,92
4	Hindu	4.012.116	1,92
5	Budha	1.703.254	0,72
6	Khong Hu Cu	117.091	0,05
7	Lainnya	299.617	0,13

Sumber: Data sensus penduduk 2010, BPS Indonesia

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat diketahui bahwa persentase penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia berdasarkan hal sensus penduduk tahun 2010 yang beragama Islam sangat besar, yaitu 87,51%. Sementara itu, jumlah penduduk yang beragama selain Islam persentasinya sangat kecil, diantaranya yaitu: Kristen 6,98%, Katolik 2,92%, Hindu 1,92%, Budha 0,72%, Khong Hu Cu 0,05%, Lainnya 0,13%. Oleh sebab itu, Indonesia juga termasuk dalam negara keanggotaan OIC yang berdiri pada tanggal 25 September 1969, walaupun pada tahun-tahun pertama Indonesia menjelaskan kepada OIC bahwa Indonesia bukanlah negara Islam secara konstitusional dan tidak dapat turut sebagai penandatanganan Piagam, tetapi Indonesia telah turut sejak awal dan juga salah satu negara pertama dan yang turut berkecimpung dalam kegiatan OKI. Kedudukan Indonesia disebut sebagai "partisipasi aktif". Status, hak dan kewajiban Indonesia sama seperti negara-negara anggota lainnya.

Jawa timur merupakan salah satu provinsi yang jumlah penduduk beragama Islamnya banyak. Data menunjukkan berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Timur beragama Islam ± 36 juta jiwa, seperti ditunjukkan dalam tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Agama, Tahun 2010

NO	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	36.113.396	96,36%
2	Kristen	638.467	1,70%
3	Katolik	234.204	0,62%
4	Hindu	112.177	0,30%
5	Budha	60.760	0,16%
6	Khong Hu Cu	6.166	0,02%
7	Lainnya	2.042	0,01%

Sumber: Data sensus penduduk 2010, BPS Indonesia

Berdasarkan pada tabel 1.2, dapat diketahui bahwa persentase penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia berdasarkan hal sensus penduduk tahun 2010 yang beragama Islam sangat besar, yaitu 96,36%. Sementara itu, jumlah penduduk yang beragama selain Islam persentasinya sangat kecil, diantaranya yaitu; Kristen 1,70%, Katolik 0,62%, Hindu 0,30%, Budha 0,16%, Khong Hu Cu 0,02%, Lainnya 0,1%. Selain itu dengan banyaknya wisata religi yang terdapat di Jawa Timur sebagai tempat ziarah yang mana salah satu diantaranya yaitu makam lima dari sembilan wali yang merupakan tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, kelima tempat wisata religi tersebut diantara adalah makam Sunan Ampel yang terdapat di kota Surabaya, Makam Sunan, Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri yang terdapat di Kabupaten Gresik, Makam Sunan Drajat yang terdapat di Kabupaten Lamongan dan yang kelima adalah Makam Sunan Bonang yang terdapat di Kabupaten Tuban, selain itu di Jawa Timur juga banyak didirikan pondok pesantren yang mana \pm 1.363 pondok pesantren yang tersebar diseluruh kabupaten/kota di Jawa Timur (wikipedia), hal ini menggambarkan bahwa kultur di Jawa Timur lekat dengan ajaran Islam, oleh sebab itu I- HDI sangat relevan bila digunakan dalam pengukuran kesejahteraan manusia di Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis kedalam bentuk skripsi dengan judul **PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA BERDASARKAN *ISLAMIC-HUMAN DEVELOPMENT INDEX (Maqashid Syariah)* KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR PERIODE 2010-2014.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan perhitungan I-HDI berdasarkan *maqashid syariah* Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode 2010-2014?
2. Bagaimana perbandingan hasil dari pengukuran pembangunan manusia yang diukur dengan perhitungan I-HDI berdasarkan *maqashid syariah* dengan HKabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode 2010-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan perhitungan I-HDI berdasarkan *maqashid syariah* Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode 2010-2014
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hasil dari pengukuran pembangunan manusia yang diukur dengan perhitungan I-HDI berdasarkan *maqashid syariah* Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode 2010-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai kesejahteraan masyarakat di daerah Jawa Timur yang diukur dengan *Islamic-Human Development Index*,

Sekaligus merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang selama ini diperoleh

2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan mengenai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang serta untuk memperbaiki kinerjanya agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sebagaimana mestinya.

3. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang berkaitan serta sebagai upaya mendorong mahasiswa, khususnya mahasiswa Ekonomi Islam, yang peka dan kritis terhadap permasalahan yang terjadi seperti ini dan juga ingin menumbuhkan kepedulian bagi masyarakat tentang adanya masalah yang dilakukan dalam penelitian ini.

4. Bagi Pengembangan Ilmu

Sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan ilmu terutama dalam hal ini adalah untuk pengembangan ekonomi pembangunan Islam.

1.5. Sistematika Skripsi

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian skripsi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penelitian skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga akan disampaikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini juga disampaikan mengenai model analisis yang digunakan serta di akhir bab ini disajikan kerangka berfikir penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Bagian-bagian dari metode penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, identifikasi komponen penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis hasil penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Adapun bagian-bagian dalam bab ini antara lain gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang berisi simpulan atas hasil pembahasan serta saran-saran yang dianggap perlu berkenaan dengan hasil pembahasan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pembangunan Ekonomi

Definisi pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Paradigma tradisional mengartikan istilah pembangunan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional (Todaro dan Smith, 2003: 18). Indeks Ekonomi yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita, yang pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mengukur kemampuan suatu negara memeperbesar outputnya dengan laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tujuan penggunaan pendapatan perkapita sebagai ukuran kemajuan pembangunan adalah untuk bisa melihat sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu bangsa secara keseluruhan, yakni seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk kegiatan konsumsi dan investasi bagi rata-rata penduduknya.

Kinerja pembangunan secara tradisional selain diukur dengan menggunakan pendapatan perkapita juga sering diukur dengan menggunakan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja secara terencana (Todaro dan Smith, 2003: 19). Strategi pembangunan yang berfokus pada pengembangan industrialisasi mengakibatkan peranan sektor pertanian akan berkurang dan teralihkan kepada sektor manufaktur dan jasa padahal kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan pada umumnya, tak kalah penting dari upaya percepatan industrialisasi.

Paradigma pembangunan ekonomi pada masa tradisional (pada tahun 1960-an) secara umum merupakan konsep bahwa pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Pada masa ini, orientasi dari pembangunan ekonomi lebih terletak pada sisi produksi (*production centered development*), yang hanya berfokus pada empat isu sentral yaitu pertumbuhan, akumulasi kapital, transformasi struktural dan peran pemerintah (Alhumami, 2005 dalam Castrenaningtyas (2011: 17)). Tinggi rendahnya tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara hanya diukur berdasarkan pertumbuhan pendapatan nasional yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lainnya, sehingga dapat tercipta kondisi yang mendukung terciptanya distribusi hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip ini disebut dengan “efek penetasan ke bawah” atau *trickle down effect* (Todaro dan Smith, 2003: 19). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan daripada permasalahan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, diskriminasi, dan pengangguran.

Pengalaman negara-negara Dunia Ketiga pada dekade 1960-an dan 1970-an yang berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun gagal memperbaiki taraf hidup 40 persen penduduknya yang masih miskin, permasalahan pengangguran, dan kesenjangan pendapatan, telah menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut saat itu. Sehingga, pada dekade 1970-an terjadi redefinisi pembangunan ekonomi dengan tujuan usaha ekonomi bukan saja untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang

tinggi tetapi juga prinsip pemerataan distribusi hasil pembangunan (*distribution growth development*) melalui pengurangan kemiskinan, penanggulangan disparitas pendapatan, dan penyediaan kesempatan kerja.

Definisi pembangunan yang baru merupakan sebuah konsep untuk retribusi hasil pembangunan. Menurut Profesor Dudley Seers (1969) dalam memberikan sejumlah pertanyaan yang merupakan landasan bagi definisi pembangunan yang baru.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai pembangunan suatu negara yang harus diajukan adalah: Apa yang telah terjadi dengan kemiskinan penduduk di daerah itu? Bagaimana dengan tingkat penganggurannya? Adakah perubahan-perubahan yang berarti atas penanggulangan masalah ketimpangan pendapatan? Jika ketiga masalah itu selama periode tertentu telah banyak teratasi, maka tidak diragukan lagi bahwa periode tersebut memang merupakan periode pembangunan bagi negara yang bersangkutan. Akan tetapi, jika salah satu atau bahkan ketiga persoalan mendasar tersebut menjadi semakin buruk, maka negara tersebut tidak bisa dikatakan telah mengalami proses pembangunan yang positif walaupun pendapatan perkapitanya mengalami peningkatan hingga dua kali lipat (Brinkman, 1995).

Dengan fokus utama pada pemerataan tersebut, maka pemerintah berupaya keras untuk mengurangi disparitas pembangunan dengan meningkatkan pembangunan wilayah pelosok desa agar dapat mengejar ketertinggalannya terhadap perkotaan. Upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan ini cenderung dilaksanakan secara sentralistik sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi tidak dilibatkan secara aktif dan menimbulkan ketergantungan terhadap pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, definisi pembangunan ekonomi pun terus mengalami perubahan sebagai pembaruan terhadap definisi sebelumnya. Pada

dekade 1980-an, definisi pembangunan yang berkembang pada masa ini merupakan sebuah konsep pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs developmens*). Dimana pada dekade ini permasalahan kependudukan, kemiskinan, urbanisasi, dan partisipasi masyarakat menjadi hal-hal yang amat diperhatikan.

Pada dekade 1990-an, definisi pembangunan telah semakin berkembang dengan didukung oleh pembangunan manusia (*human development*) sehingga terbentuk definisi pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*) (Sumarsono, 2002). Definisi pembangunan yang berorientasi pada manusia ini disebut juga dengan paradigma pembangunan manusia (Syukir, 2008 dalam Castrenaningtyas (2011: 19)). Dalam salah satu publikasi resminya, Bank Dunia (1991) dalam Castrenaningtyas (2011: 19) yang selama dekade 1980-an menjunjung tinggi pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan akhirnya melakukan redefinisi dengan pernyataan sebagai berikut :

Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Pertama di negara-negara yang paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi, namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya.

Menurut Amartya Sen (1999), pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak bisa dianggap sebagai tujuan terakhir. Pembangunan haruslah

lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati. Hal terpenting bukanlah apa yang dimiliki oleh seseorang, tetapi apakah yang dapat dilakukan seseorang dengan barang-barang tersebut. Manfaat dari sebuah komoditi inilah yang menurut Sen dapat mempengaruhi kesejahteraan. Konsep ini disebut juga dengan pendekatan kapabilitas dari Sen.

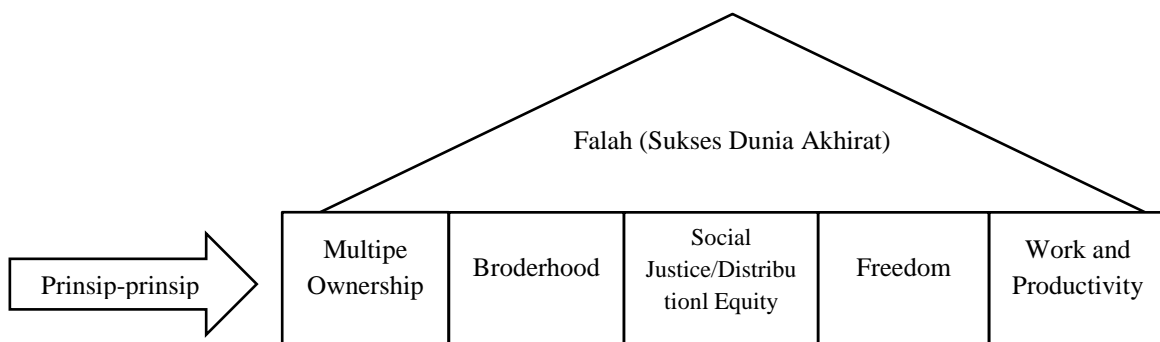
Dalam buku *Pembanguna Ekonomi di Dunia Ketiga*, Todaro (2003: 28) menuliskan bahwa terdapat tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan, yakni peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan yang pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan), peningkatan standar hidup, serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Ketiga nilai inti tersebut berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai manifestasi di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

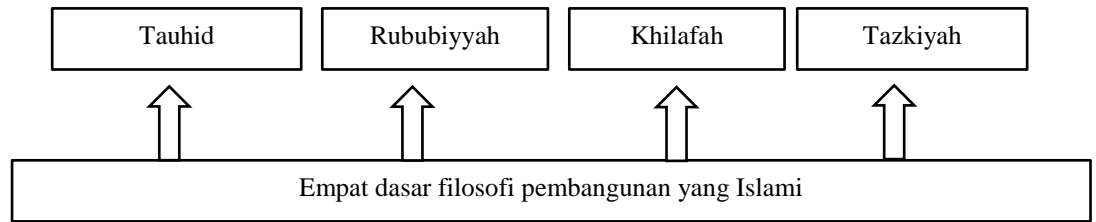
Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, yang selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi juga dapat mengentas kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Todaro dan Smith, 2003). Sehingga, proses pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial dalam suatu masyarakat, untuk bergerak menuju kondisi yang lebih baik.

2.2. Teori Pembangunan Ekonomi Islam

Ahmad (1980: 179-180; 1994: 19-20) mengemukakan empat filosofis dasar-dasar pendekatan Islam dalam pembangunan, sebagai berikut:

1. *Tauhid*, yang mengacu kepada pengakuan terhadap keesaan Allah dan kekuasaan-Nya yang menetapkan aturan hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia (*hablum-minallah and hablum-minannas*).
2. *Rububbiyyah*, beri'tiqad bahwa Allah ialah Tuhan yang menciptakan alam, mentabdir, memilikinya, memberi rezeki, segala-alanya di bawah pengetahuan, kehendak dan kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga. Beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberikan mnfaat , menolak mudharat serta menjaga seluruh alam semesta.
3. *Khilafah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumber daya yang diamankan kepadanya.
4. *Tazkiyah*, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungannya, masyarakat dan negara.





Sumber: Ahmad, *Economic Development in Islamic Framework*

Gambar 2.1 **Dasar Filosofi Pembangunan Ekonomi Khurshid Ahmad**

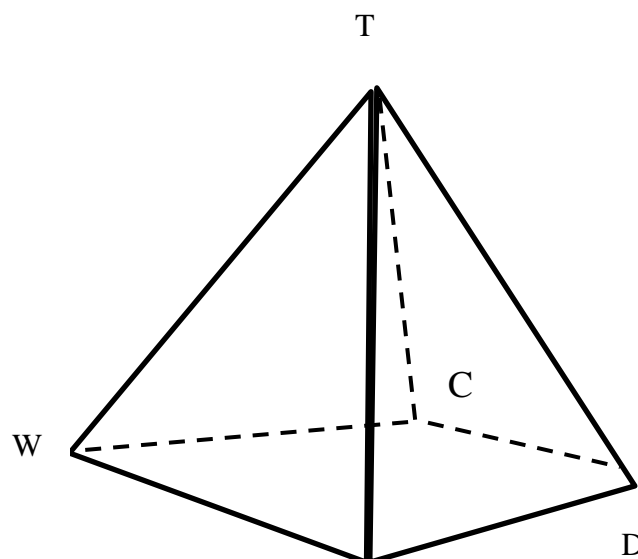
Berdasarkan prinsip-prinsip fundamental dan nilai-nilai, Ahmad (1980: 179-1980; 1994: 23-25) menguraikan lima fitur penting dari konsep pembangunan Islam, sebagai berikut Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin di capai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tahmetapi juga di akhirat.

1. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
2. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.

3. Pembangunan ekonomi melibatkan sejumlah perubahan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan seimbang antara satu sama lain.

Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada; a) pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin, b) pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Choudhury dalam bukunya *Contribution to Islamic Economic Theory* mengatakan bahwa ada lima prinsip dalam perekonomian Islam yang dibutuhkan dalam pembangunan yang kemudian di sebut dengan prisma ekonomi Islam (Rafsanjani, 2014: 14). Berikut ini merupakan gambar prisma ekonomi Islam tersebut



Sumber: Masudul Alam Choudhury, *Contribution to Islamic Economic Theory* dalam Haqiqi Rafsanjani, *Analisis Islamic Development Index* di Indonesia

Keterangan: T : *Tauhid*
 W : *Work and Productivity*
 C : *Cooperations*
 O : *Ownership*

D : *Distribution Equity***Gambar 2.2****Prisma Ekonomi Islam Versi Masudul Alam Choudhury**1. *Tauhid* (T)

Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang serba berkecukupan itu untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat, bukan untuk perorangan, karena setiap insan yang beriman mengakui bahwa kepemilikan mutlak adalah pada Allah SWT.

Untuk mewujudkan prinsip tauhid dan persaudaraan, Islam melarang riba dalam segala bentuk dan manifestasinya. Secara tauhid, Allah SWT sebagai pemilik sumber daya ekonomi telah menentukan bahwa setiap kekayaan adalah untuk kepentingan semua manusia.

2. *Work and productivity* (W)

Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak nabi yang pertama, Adam As, sampai terakhir Muhammad Saw. Perintah ini tetap berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang. Berikut dalil QS. Jum'ah(62):10 tentang keajiban bekerja.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Fa iżā quḍiyatiṣ ṣalātu fantasyirū fil arḍi wabtagū min faḍlillāhi ważkurullahāha kasiiral la'allakum tuflihūna(a).

Artinya: “Dan bila shalat Jum’at telah ditunaikan, berpencarlah di permukaan bumi untuk mencari karunia Allah. Dan perbanyaklah mengingat Allah semoga kamu beruntung” QS. Jum'ah(62):10 (Departemen RI (2012: 554).

Tafsir ayat di atas dalam Surin (2004: 2418), adalah menunaikan shalat yang berguna untuk kemaslahatan kehidupan akhirat, tunaikan pula usaha-usaha untuk kehidupan duniawi. Namun dalam mencari kehidupan duniawi itu, hendaklah ingat kepada Allah, agar kita dipelihara oleh Tuhan dari sikap “menghalalkan segala cara” untuk mendapatkan rezeki itu. Hal ini relevan dengan kerja dan produktifitas dalam perspektif Islam adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu:

- 1) Mencukupi kebutuhan hidup (*al-isyba'*)
- 2) Meraih laba yang wajar (*al-irbah*)
- 3) Menciptakan kemakmuran lingkungan baik sosial maupun alamiah

3. *Cooperations* (C)

Kerja sama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama (Soekonto, 1990 dalam Rafsanjani(2014:16)). Kerja sama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil (Baron & Byane, 2000 dalam Rafsanjani(2014:16)).

Kerja sama merupakan karakter yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Nilai kerja sama ekonomi ini harus dapat dicerminkan dalam semua tingkatan kegiatan ekonomi , produksi, distribusi barang maupun jasa. Doktrin kerja sama dalam bidang ekonomi ini akan dapat menciptakan kerja produktif sehari- hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah penidasan

ekonomi dan distribusi ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi dari pihak atau golongan ekonomi lemah.

4. *Ownership (O)*

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia di beri Amanah untuk mengelolanya. Jadi, manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Konsep kepemilikan swasta diakui. Namun, untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman golongan orang terhadap yang lain, maka cabang- cabang produksi yang penting dalam menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta- negara, swasta domestik- asing, atau negara-negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma, dan nilai- nilai Islam.

5. *Distribution Equity (D)*

Sistem ekonomi dalam Islam, berbagai permasalahan perekonomian telah di jamin dalam pengoptimalan distribusi, yaitu dengan cara menentukan tata cara kepemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta menyuplai orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harta yang bisa menjamin hidupnya dalam rangka mewujudkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhannya di antara sesama. Dengan demikian, Islam telah memecahkan masalah buruknya distribusi tersebut. Instrumen zakat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dapat mencakup perluasan kesempatan kerja,

kesejahteraan keluarga, rehabilitas manusia usia lanjut, asuransi pengangguran, kopensasi bagi yang kekurangan ketika resesi dan depresi.

2.3. *Maqashid Syariah*

Maqashid adalah bentuk plural (*jama' taksir*) dari kata *maqashid* yang dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar *maqashid* terbagi menjadi dua macam, yaitu *maqashid ashliyyah* dan *maqashid tabi'ah* (al-Syatibi dalam Hafid, 2013: 41). Penamaan seperti ini, penamaan yang dilakukan oleh al-Syatibi. Untuk *maqashid ashliyyah*, maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. *Maqashid ashliyyah* ini terbagi kepada *dharurah 'ainiyah* dan *dharurah kifaiyah* (al-Syatibi dalam Hafid, 2013: 41).

Adapun *dharurah 'ainiyah* adalah kewajiban setiap orang mukallaf, sementara itu, *dharuriah kifaiyah* adalah kewajiban- kewajiban kolektif. (al-Syatibi dalam Hafid, 2013: 41). *Maqashid tabi'ah* di mana di dalamnya ada porsi keterlibatan orang mukallaf. Maka dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan yang bersifat kebutuhan manusia dan dengan pemunahan semua kebutuhan manusia itulah urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Ini semua dengan sebab pemberian Allah yang maha bijaksana. Dia menciptakan untuk manusia keinginan untuk makan, minum, seks, keadaan panas, dingin, sehingga manusia perlu berusaha untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perempuan dan perumahan yang layak untuk memperthankan hidupnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allah juga menciptakan surga dan neraka, dikirim Rasulnya untuk

menyampaikan bahwa tempat abadi bukanlah dunia ini, tetapi ada akhirat yang harus dipertanggungjawabkan, yang dapat membuat seseorang bahagia atau celaka selama-lamanya. Berdasarkan pada hal itu, maka *maqashid tabi'ah* adalah pelengkap untuk *maqashid ashliyah* (al-Syatibi dalam Hafid, 2013: 41-42).

Sementara itu, makna Syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan manusia (Qardhawi, 2007: 12). Maksud- maksud syari'at ini bukanlah illat yang disebutkan oleh para ahli ushul fiqh dalam bab qiyas, dan didefinisikan dengan sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum. Lebih lanjut lagi al-Syatibi membedakan kelima unsur pokok di atas menjadi tiga peringkat, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyah* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyah* kemudian di skala terakhir disusul oleh *tahsiniyyah*.

Ketiga kelompok tersebut memiliki arti masing- masing, Lebih jauh lagi al-Syatibi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyah* adalah memelihara kebutuhan- kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta tetapi dalam batas jangan sampai eksistensi kelima kebutuhan pokok tersebut terancam. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima kebutuhan pokok atas.

Berbeda dengan kelompok *dharuriyyah*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak harus terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Sementara itu, kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT.

Pada dasarnya, ketiga kelompok tersebut dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok yang sudah di bahas sebelumnya. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang apabila kelima pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Untuk kelompok kebutuhan kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder yang berarti apabila kelima pokok tersebut diabaikan pemenuhannya maka tidak akan sampai mengancam eksistensi kelima pokok melainkan akan mempersulit kehidupan manusia. Kelompok kebutuhan yang terakhir adalah dapat dikatakan sebagai pelengkap. Hal ini dikarenakan apabila kelima pokok tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi dan mempersulit kehidupan. Kebutuhan pelengkap ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai kepatutan.

Menurut Imam al-Ghazali, kajian *maqashid syariah* memiliki cakupan yang lebih luas lagi, beliau membagi-bagi *maqashid syariah* menjadi tiga, yaitu *dharuriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah*

(kebutuhan tersier) (karim, 2007: 62). Di mana dari ketiga hal tersebut beliau menjabarkannya kembali kepada lima hal yang merupakan pemeliharaan lima tujuan dasar agar manusia dapat mencapai *maslahah* (kesejahteraan). Pendapat lain tentang definisi *maqashid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum- hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat- ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Effendi, 2009: 233).

Berdasarkan pada definisi dari berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bahwa “*maqashid syariah* adalah hal- hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai *falah*, yaitu kebutuhan di dunia dan di akhirat. Tanpa memenuhi seluruh hal tersebut, maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna”. Menurut Djamil (1995: 41-44) dijelaskan tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing- masing. Kelima pokok tersebut dijelaskan sesuai dengan urutannya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang kemudian digolongkan lagi menjadi tiga kelompok kebutuhan, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tashiniyyah* yang akan dijelaskan berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.

2.3.1. Lima Aspek dalam *Maqashid Syariah*

Menurut Imam al-Syatibi, Allah menurunkan syariah (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jaibul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dalam bahasa yang lebih mudah, aturan- aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri

(al-Syatibi dalam Hafid, 2013: 44). Al-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyah* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tashiniyyat* (tersier).

Maqashid atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hali ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, *shaum* dan ibadah- ibadah lainnya, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-maal*) dan (*al-'aql*) (al-Syatibi dalam Hafid, 2013: 45).

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat di tempuh dengan dua cara yaitu, *pertama*, dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan *kedua*, dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal- hal yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh: menjaga agama dari segi *al- wujud* misalnya dengan shalat dan zakat, menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya hukuman *qishas* dan *diyat*, menjaga akal dari segi *al- wujud* misalnya makan dan mencari ilmu, menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya nikah, menjaga keturunan dari segi *al-'adam* mislanya had bagi penzinah dan *muqdzif*, menjaga harta dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Pembebanan hukum syariat pada makhluk melekat dengan *maqashid*-nya . *Maqashid syariah* tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tashiniyyat*. Ketiganya itu harus diterapkan pada lima aspek *maqashid syariah*, hal ini seperti di bawah ini:

1. Memelihara Agama (*Hifdzu ad-Dien*)

Menjaga atau memelihara agama adalah menjaga agama (rukun iman dan rukun Islam), berdasarkan tingkatnya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk dalam tingkat primer, seperti adanya penutup aurat dalam melaksanakan shalat, adanya pendidikan tata cara shalat, jika hal ini tidak ada, maka akan mengancam eksistensi agama
- 2) Memelihara dalam peringkat *hajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, misalnya adanya penutup aurat yang layak dalam melaksanakan ibadah shalat, seandainya tidak ada pakaian yang layak maka shalatnya akan tetap sah.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT. Misalnya adanya tempat shalat yang bagus, sehingga membuat *mushalli* betah untuk beribadah lama dalam mushallah tersebut. Kegiatan ini erat kaitannya dengan etika yang baik. Jika hal ini tidak dilakukan karena tidak memungkinkan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan mempersulit orang yang bersangkutan.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdzu an-Nafs*)

Memelihara jiwa di sini adalah menjaga fisik agar tetap sehat dan tetap bisa beraktifitas, berdasarkan tingkat kepentingannya juga dapat dibedakan menjadi tiga tingkatannya, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup dan obat- obatan untuk menghilangkan penyakit. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensinya jiwa manusia, atau apabila obat-obatan ini tidak ada maka juga sama.
 - 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, seperti dibolehkan menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
 - 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tashiniyyah* seperti tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
3. Memelihara Akal (*Hifdzu al-'Aql*)

Memelihara akal adalah memelihara akal supaya akal tidak rusak baik secara fisik maupun non fisik, secara fisik maksudnya akal tidak dirusak dengan sesuatu yang merusak secara fisik, baik dirusak dengan narkoba atau yang lain, sedangkan secara non fisik maksudnya akal tidak di cuci otaknya dengan hal- hal negatif. Di lihat dari segi kepentingan menjaga akal, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyah* adalah memelihara akal di tingkat dasar seperti diharamkan mengkonsumsi narkoba atau hal-hal yang menyebabkan pikiran hilang. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal/ hilang pikiran.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyah* seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang dibutuhkannya. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal seseorang tetapi hanya akan mempersulit diri orang tersebut dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi kalau pendidikan itu skala besar maka tingkatnya bukan *hajiyyah* lagi melainkan *dharuriyyah*.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tashiniyyah* erat kaitannya dengan etika dan jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, pemberian beasiswa untuk studi di strata yang tinggi
4. Memelihara Keturunan (*Hifdzu an- Nasl*)

Memelihara keturunan adalah memelihara keturunan untuk menjadi lebih baik dengan jumlah yang banyak. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyah* seperti anjuran untuk menikah. Jadi dapat dikatakan upaya untuk menjaga eksistensi keturunan adalah dengan menikah, dengan membantu kegiatan melahirkan agar bayi yang lahir dalam keadaan selamat dan yang lain.

- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyah* seperti memberikan supplement- supplement tambahan yang dibutuhkan bayi, supaya bayi menjadi tumbuh sehat.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tashiniyyah* seperti menyediakan tempat yang kondusif, enak dan tenang bagi ibu yang mau melahirkan, sehingga para ibu senang untuk melahirkan dan merawat bayinya di sana.

5. Memelihara Harta (*Hifdzu al-Maal*)

Memelihara harta adalah memelihara harta supaya harta tersebut tidak rusak/ masih tetap ada bahkan berkembang, di lihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyah* seperti larangan mengambil harta orang lain yang bukan merupakan hak kita dengan cara yang tidak benar, di larang memebrikan hartanya anak bodoh kepada anak bodoh sampai dia cerdas. Apabila kita melanggar dengan cara yang bukan menjadi hak kita atau memberikan hartanya anak bodoh kepada anak bodoh maka eksistensi harta akan terancam.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyah* adalah memenuhi kebutuhan tingkat kedua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari seperti menginvestasikan hartanya atau mengajak orang bekerjasama dalam bisnis.
- 3) Memelihara dalam peringkat *tashiniyyah* erat kaitannya dengan etika bermualah atau berbisnis. Misalnya mengikuti pendidikan muamalah/ berbisnis modern.

2.1.7. *Human Development* (Pembangunan Manusia)

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses memperluas kesempatan dan kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan upaya memperbaiki tingkat penghargaan terhadap eksistensi masing-masing masyarakat sebagai manusia (Srinivasan, 1994). Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan, hidup lebih lama dan sehat, serta dengan mudah mengakses segala sumber daya yang diperlukan sebagian pemenuhan standar hidup layak.

Pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari proses pencapaian pertumbuhan ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Terdapat hubungan yang kuat antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi (Ranis dan Steward, 2000), yang membentuk mata rantai dan berhubungan timbal balik. Di satu sisi adanya pertumbuhan ekonomi memungkinkan tersedianya sumber daya untuk memperbaiki pembanguan manusia secara berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan kualitas pada angkatan kerja yang didapat dari adanya pembanguan manusia merupakan kontribusi penting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Menurut Brata (2002), rantai hubungan dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia, Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Alokasi dan perbedaan perilaku rumah tangga maupun pemerintah dapat menyebabkan perbedaan kinerja pembangunan manusia sekalipun kinerja ekonominya setara. Kencenderungan rumah tangga untuk membelanjakan pendapatan bersih mereka untuk barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti

makanan, air, pendidikan, dan kesehatan, tergantung dari sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga. Penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia.

2.4. *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan, yaitu derajat perkembangan manusia (Tambunan, 2003:167). Indeks ini merupakan gabungan atas tiga kriteria sebagai output yang diharapkan dari proses pembangunan (UNDP, 2004):

1. Ketahanan hidup, yang diukur dari angka harapan hidup (*Life Expectancy/LE*) penduduk di suatu wilayah.
2. Pengetahuan yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf penduduk dewasa dengan bobot dua per tiga dan angka rata-rata lama masa sekolah penduduk di suatu wilayah dengan bobot sepertiga.
3. Kualitas standar hidup diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity, PPP*) dari mata uang domestik masing-masing wilayah.

IPM hanya mengukur tingkat-tingkat pembangunan manusia secara relatif., bukan absolut. Berfokus pada hasil-hasil pembangunan, bukan semata-mata

sarana (input) dalam proses pembangunan yakni pendapatan nasional atau pendapatan per kapita (kuncoro, 2003:27).

Angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tak langsung yakni dengan menggunakan data Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup (AMH) (Preston, 2004 dalam Castrenaningtyas, 2011:41). Besarnya nilai maksimum dan minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh 175 negara di dunia. Pada komponen umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (BPS).

Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka melek huruf adalah presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Untuk menghitung indeks pendidikan, dipakai batasan sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf dipakai 100 sebagai batas maksimum dan angka 0 sebagai batas minimum. Angka 100 mencerminkan kondisi 100 persen semua masyarakat mampu membaca dan menulis dan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya (BPS).

Dalam cakupan yang lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin

membbaiknya ekonomi. UNDP mengukur indeks ini dengan menggunakan PDB riil yang disesuaikan sedangkan BPS menghitungnya dengan menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Secara sederhana, nilai maksimum dan minimum komponen IPM dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen HDI/ IPM

No	Komponen HDI	Maksimum	Minimum	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3	Rata-rata pencapaian pendidikan (Tahun)	15	0	Standar UNDP
4	Daya Beli (rupiah)	737,72	360	Pengeluaran perkapita Riil disesuaikan

Sumber: BPS, Jawa Timur

Perhitungan IPM dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \quad (2.1)$$

Keterangan : X_1 = angka harapan hidup

X_2 = tingkat pendidikan

X_3 = tingkat daya beli

Untuk masing-masing indeks pada persamaan (2.1) dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$\text{Indeks } (X_{(i,j)} = \frac{X_{(i,j)} - X_{(1-\min)}}{X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)}} \quad (2.2)$$

Keterangan: $X_{(i,j)}$: indikator ke i dari daerah j ($i = 1,2,3; j = 1,2,3 \dots n$)

$X_{(1-\min)}$: nilai minimum dari indikator X_I

$X_{(i-\max)}$: nilai maksimum dari indikator X_I

Penyusunan peringkat IPM masing-masing daerah dilakukan dengan menggunakan skala antara nol sampai seratus. Skala nol adalah daerah dengan IPM terendah dan skala seratus merupakan daerah dengan prestasi IPM tertinggi. Klasifikasi daerah berdasarkan besarnya angka IPM adalah sebagai berikut (UNDP):

1. Daerah dengan pembangunan manusia rendah (*low human development*) yaitu daerah dengan kisaran angka IPM antara 0 hingga kurang dari 50 (<50)
2. Daerah dengan pembangunan manusia menengah bawah (*lower medium human development*) yaitu daerah dengan kisaran angka IPM antara 50 hingga kurang dari 66 (< 66).
3. Daerah dengan pembangua manusia menengah atas (*upper medium human development*) yaitu daerah dengan kisaran angka IPM antara 66 hingga kurang dari 89 (< 89).
4. Daerah dengan pembangunan manusia tinggi (*high human development*) yaitu daerah dengan kisaran angka IPM 89 ke atas.

2.5. Islamic-Human Development Index

2.5.1 Pengertian

I-HDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat

hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai falah). Menurut al-Syatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*An-nasl*), dan harta (*al-maal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna (P3EI: 2012, 5-6).

2.5.2. Konsep Pengukuran *Islamic Human Development Index*

Pemenuhan lima kebutuhan dasar *maqashid syariah* yang didasarkan pada pandangan Imam al-Syatibi akan dijadikan sebagai dasar teoritis untuk membangun *Islamic Human Development Index*. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini diusulkan lima dimensi untuk membangun I-HDI. Dimensi ini akan mengukur baik pada kinerja kesejahteraan *material* (MW) maupun kesejahteraan *non-material* (NW).

Berdasarkan pada pemenuhan lima kebutuhan dasar *maqashid syariah* pandangan Imam al-Syatibi, maka kesejahteraan dalam Islam dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut (Anto, 2009, dalam Rafsanjani 2014).

$$WH : f(MW, NW) \quad (2.3)$$

$$MW : f(PO, DE) \quad (2.4)$$

$$NW : f(IEV) \quad (2.5)$$

$$IEV : f(LE, E, FSR, R) \quad (2.6)$$

Keterangan:

- WH : *Welfare Holistic*
MW : *Material Welfare*
PO : *Non Material Welfare*
DE : *Distributional Equity*
IEV : *Islamic Environment and Values*
LE : *Life Expectancy*
E : *Education*
FSR : *Family and Social Relationship*
R : *Religiosity*

Berdasarkan pada Rumusan no 2.3, maka dapat diketahui bahwa kesejahteraan holistik (WH) dalam Islam menyangkut baik kesejahteraan materi (MW) dan kesejahteraan non materi (NW). Kesejahteraan materi berdasarkan rumus 2.4, dapat dipengaruhi oleh kepemilikan harta atas individu (PO) dan distribusi pendapat (DE). Sementara itu, kesejahteraan non materi berdasarkan pada Rumus no 2.5, dipengaruhi oleh nilai- nilai Islam (IEV) yang terdiri dari kesehatan (LE), pendidikan (E), keluarga atau keturunan (FSR), dan keagamaan (R), seperti yang terlihat pada rumus no 2.6.

Setelah merumuskan kesejahteraan yang holistik dalam perspektif Islam berdasarkan pada pandangan Imam al-Syatibi, maka langkah selanjutnya untuk membangun I-HDI yaitu membentuk sebuah indeks yang terukur untuk mengukur semua dimensi. Indeks yang diusulkan untuk mengukur semua dimensi ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Lima Indeks yang Diusulkan

Tujuan Pembanguna	Dimensi	Indeks Dimensi
<i>Maslahah</i>	<i>Hifdzu ad-Dien</i>	<i>Index ad-Dien</i>
	<i>Hifdzu an-Nafs</i>	<i>Indekx an-Nafs</i>
	<i>Hifdzu al-'Aql</i>	<i>Index al-'Aql</i>
	<i>Hifdzu an-Nasl</i>	<i>Index an-Nasl</i>
	<i>Hifdzu al-Maal</i>	<i>Index-al-Maal</i>

Sumber: Anto, 2009. *Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Developmen in OIC Countries*, disesuaikan, dalam Rafsanjani, 2014. Analisis Islamic Development Index di Indonesia.

Berdasarkan pada Tabel 2.2, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam yaitu berdasarkan pada *maslahah*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *maslahah* dasar manusia terdiri dari lima hal, yaitu dengan pemeliharaan terhadap agama jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehubungan dengan hal itu, maka untuk mengukur kelima dimensi tersebut dibentuklah suatu indeks yang mewakili dari masing-masing dimensi tersebut dibentuklah suatu indeks yang diusulkan untuk mengukur kelima dimensi tersebut yaitu: *index ad-dien* yang mewakili dimensi agama, *index an-nafs* yang mewaili dimensi umur panjang dan sehat, *index al-'aql* yang mewakili dimensi pengetahuan, *index an-nasl* yang mewakili dimensi keluarga dan keturunan, dan *index al-maal* yang mewakili dimensi pendapatan.

Kelima indeks yang diusulkan tersebut digunakan untuk mengukur dari kelima dimensi *maqashid syariah*. Nilai dari kelima indeks yang telah diusulkan di atas akan di hitung berdasarkan pada indikator- indikator yang mencerminkan

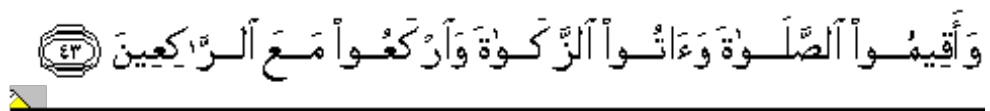
dari masing-masing dimensi *maqashid syariah*. Penjelasan dari masing-masing indeks dimensi dengan indikator yang diusulkan yaitu sebagai berikut.

2.5.2.1. *Hifdzu ad-Dien*

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak di ukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran (P3EI, 2012: 7). Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*).

Agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun ia berada. Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifdzu ad-dien* antara lain sebagai berikut.

Qs. al-Baqarah (2): 43. Tentang Perintah Shalat dan Zakat



Wa aqimuṣ ṣalāta wa ātuz zakāta warka'ū ma'ar rāki'iin(a).

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” Qs. al-Baqarah (2): 43 (Departemrn RI (2012: 7)).

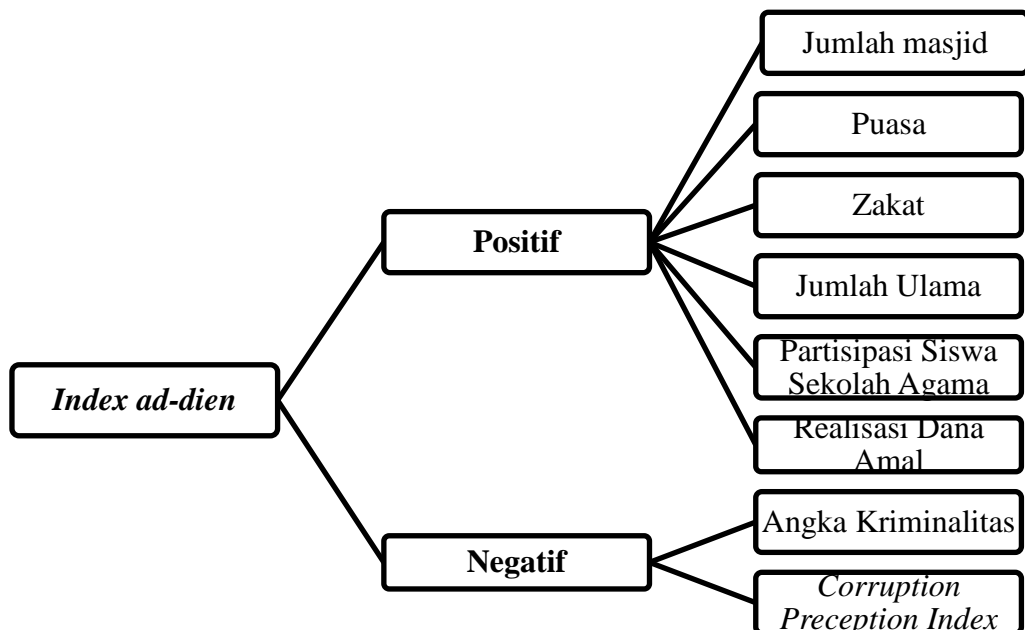
QS. Ali Imron (3): 114. Printah Amar Ma'ruf Nahi Munkar

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Yu'minūna billāhi wal yaumul ākhiri wa ya'murūna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusāri'una fil khairāt(i), wa ulā'ika minas ṣāliḥīn(a).

Artinya: “Dan hendaklah ada di antar kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” QS. Ali Imron (3): 114 (Departemen RI (2012: 64)).

Untuk mengukur dimensi *hifdzu ad-dien*, maka dibentuk *index ad-dien* dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi *ad-dien*. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi *hifdzu ad-dien* diantaranya seperti yang ditunjukkan dala gambar 2.3 di bawah ini.



Sumber: Dibangun dari tiga jurnal international

1. Anto, 2009. *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development un OIC Contries.*
2. Hapsari & Herianingrum, 2014. *Maqashid Index, a Succes Indicator of The Social Economic Development.*

3. Amin, Dkk. *A Newga Comprehensive Approach to Measuring Human Development*.

Dalam Rafsanjani, 2014. *Analisis Islamic-Human Development Index di Indonesia*.

Gambar 2.3
Possible Indikator for Index ad-Dien

Berdasarkan pada Gambar 2.3, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk *index ad-dien*. *Index ad-dien* merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi agama. Secara umum, indikator-indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu indikator positif dan negatif. Beberapa indikator yang berdimensi positif sebagian diambil dari lima rukun Islam, kecuali syahad yang terdiri: jumlah masjid, puasa, zakat, haji, jumlah ulama, partisipasi sekolah agama, dan realisasi dana amal. Sementara itu, indikator yang berdimensi negatif terdiri dari angka kriminalitas dan *Corruption Preception Index* (CPI).

Beberapa indikator yang telah disebutkan di atas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membentuk *index ad-dien*. Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut di ambil dari 3 jurnal internasional, 1) Hapsari & Herianingrum, 2) Amin, Dkk, dan 3) Anto dalam Rafsanjani (2014), namun tidak semua dari beberapa indikator yang telah disebutkan diatas digunakan, adapun alasannya adalah 1) ketersediaan data, 2) tidak semua penduduk Jawa Timur beragama Islam, sehingga ada beberapa indikator yang tidak bisa digunakan, oleh sebab itu dalam penelitian ini angka kriminalitas dan angka partisipasi siswa sekolah agama yang digunakan sebagai indikator dalam dimensi *ad-dien*, berikut penjelasannya.

Crime Rate adalah angka yang menunjukkan pada tingkat kerawanan suatu jenis kejahatan pada suatu daerah (kota) dalam waktu tertentu (BPS). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kriminalitas adalah sebagai berikut.

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000 \quad (2.7)$$

Partisipasi siswa sekolah agama banyaknya siswa yang mendaftar di sekolah keagamaan, seperti pondok pesantren, Madrasah Ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah.

2.5.2.2 *Hifdzu an-nafs*

Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaiknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus dihindari. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifdzu an-nafs* antara lain sebagai berikut.

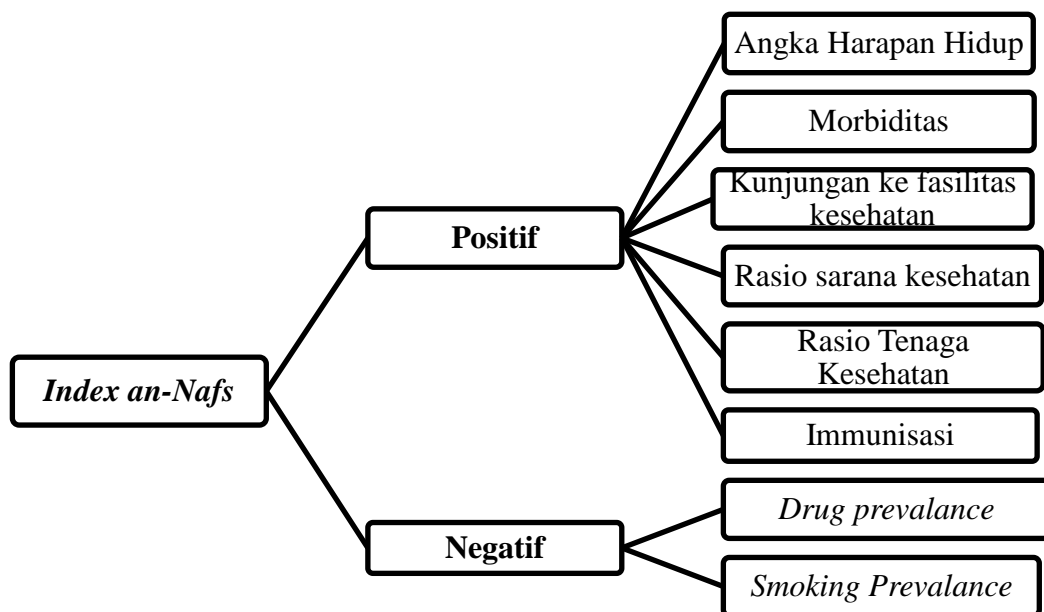
QS. al-Baqarah (2): 195. Larangan Menjatuhkan Diri ke dalam Kebinasaan

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Wa anfiqū fī sabīlillāhi wa lā tulqū bi'aidikum ilat tahlukah(ti), wa ahsinū, innallāha yuḥibbul muhsinīn(a).

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” QS. al-Baqarah (2): 195 (Departemen RI (2012: 30)).

Untuk mengukur dimensi *hifdzu an-nafs*, maka di bentuk *index an-nafs* dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi *an-nafs*. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi *hifdzu an-nafs* diantaranya seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.4.



Sumber: Dibangun dari tiga jurnal internasional

1. Anto, 2009. *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development un OIC Contries.*
2. Hapsari & Herianingrum, 2014. *Maqashid Index, a Succes Indicator of The Social Economic Development.*
3. Amin, Dkk. *A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development.*

Dalam Rafsanjani, 2014. *Analisis Islamic-Human Development Index di Indonesia.*

Gambar 2.4
Possible Indikator for Index an-Nafs

Berdasarkan pada Gambar 2.4, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk *index an-nafs*. *Index an-nafs* merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat. Secara umum, indikator-indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu indikator positif dan negatif. Beberapa indikator yang berdimensi positif terdiri dari: angka harapan hidup, *mordibitas*, angka kunjungan ke fasilitas kesehatan, sarana kesehatan, tenaga esehatan, dan imunisasi. Sementara itu, beberapa indikator yang berdimensi negatif terdiri dari: *drug prevalance* dan *smoking prevalance*. Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut di ambil dari 3 jurnal internasional, 1) Hapsari & Herianingrum, 2) Amin, Dkk, dan 3) Anto dalam Rafsanjani (2014), namun tidak semua dari beberapa indikator yang telah disebutkan diatas digunakan, adapun alasannya adalah 1) ketersediaan data, 2) beberapa data yang digunakan menyesuaikan dengan perhitungan HDI di Jawa Timur, sehingga ada beberapa indikator yang tidak bisa digunakan, oleh sebab itu dalam penelitian ini angka harapan hidup yang digunakan sebagai indikator dalam dimensi *an-nafs*, berikut penjelasannya, yang mana sudah dijelaskan di bab *Human Developmen Index* sebelumnya bahwa angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tak langsung yakni dengan menggunakan data Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup (AMH) (Preston, 2004 dalam Castrenaningtyas, 2011:41). Besarnya nilai maksimum dan minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh 175 negara di dunia. Pada komponen umur harapan hidup, angka

tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (BPS).

2.5.2.3. *Hifdzu al-‘Aql*

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat kauniyah) dan ajaran agama dalam Al-Qur’an dan Hadist (ayat-ayat qauliyah) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Sehubungan dengan hal itu, Islam memberikan perintah yang sangat taegas bagi seorang mukmin untuk menuntut Ilmu (Rafsanjani,2014:44). Beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan *hifdzu al-‘aql* antara lain sebagai berikut.

Qs. al-‘Alaq (96): 1-5. Perintah Untuk Menuntut Ilmu

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②
 أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤

Iqra’ bismi rabbikal lazi khalaq(a). Khalaqal insana min ‘alaq(in). Iqra’ wa rabbikal akram(u). Allaazi ‘allama bil qalam(i). ‘Allamal insana ma lam ya’lam.

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah , dan Tuhanmulah yang maha pemurah. (4) yang mengajar (manusia) dengan

perantaraan kalian. (5) Dia mengejar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” Qs. al-‘Alaq (96): 1-5 (Departemen RI (21012: 597).

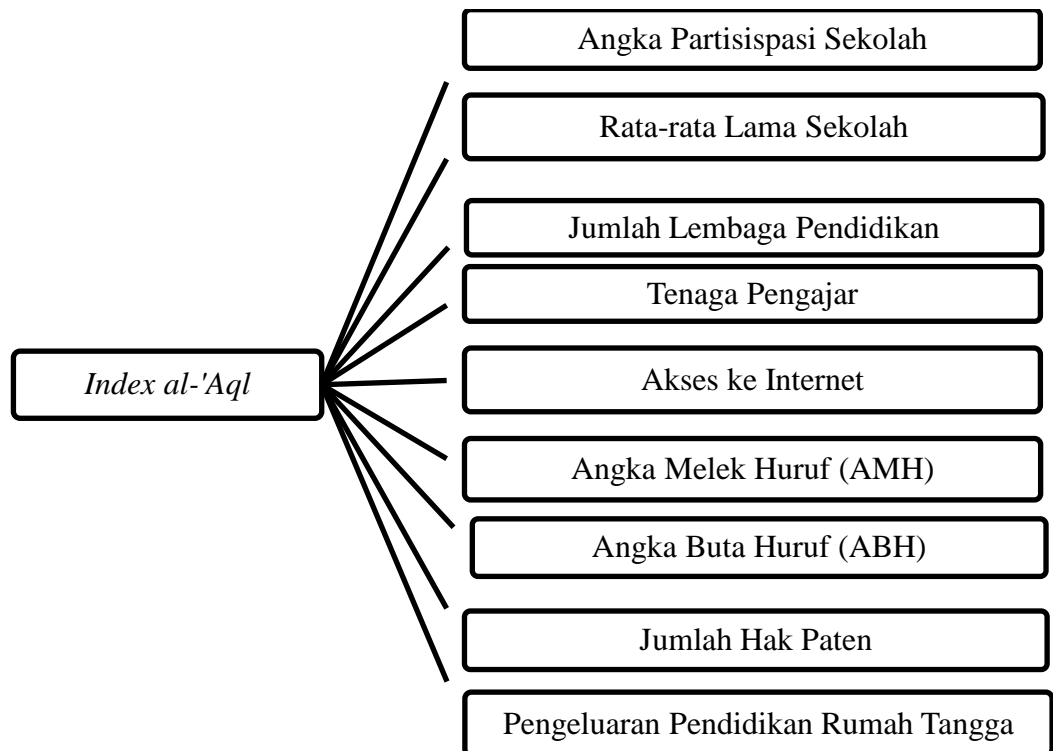
QS. al-Mujadilah (58):11. Derajat Orang yang Memiliki Ilmu Pengetahuan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Yā ayyuhal lazīna āmanū izā qīla lakum tafassahū fil majālisi fafsahū yafsaḥillāhu lakum, wa izā qīlansyuzū fansyuzū yarfa’illāhul lazīna āmanū minkum, wal lazīna ūtul ‘ilma darajāt(in), wallāhu bimā ta’malūna khabīr(un).

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis’, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” QS. al-Mujadilah (58):11 (Departemen RI (2012: 543).

Untuk mengukur dimensi *hifdzu al-‘aql*, maka di bentuk *index al-‘aql* dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi *al-‘aql*. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi *hifdzu al-‘aql* diantaranya seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.5.



Sumber: Dibangun dari tiga jurnal international

1. Anto, 2009. *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development un OIC Contries.*
2. Hapsari & Herianingrum, 2014. *Maqashid Index, a Succes Indicator of The Social Economic Development.*
3. Amin, Dkk. *A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development.*

Dalam Rafsanjani, 2014. *Analisis Islamic-Human Development Index di Indonesia.*

Gambar 2.5
Possible Indikator for Index an-'Aql

Berdasarkan pada Gambar 2.5, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk *index al-'aql*. *Index al-'aql* merupakan indeks yang digunakan yaitu: angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, jumlah lembaga pendidikan, tenaga pengajar, akses ke internet, angka melek huruf, angka buta huruf, jumlah hak paten dn pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga. Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut di ambil dari 3 jurnal internasional, 1) Hapsari & Herianingrum, 2) Amin, Dkk, dan 3) Anto

dalam Rafsanjani (2014), namun tidak semua dari beberapa indikator yang telah disebutkan diatas digunakan, adapun alasannya adalah 1) ketersediaan data, 2) beberapa data yang digunakan menyesuaikan dengan perhitungan HDI di Jawa Timur, sehingga ada beberapa indikator yang tidak bisa digunakan, oleh sebab itu dalam penelitian ini angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang digunakan sebagai indikator dalam dimensi *al-aql*, adapun penjelasannya sebagai berikut, yang mana sudah dijelaskan di bab *Human Developmen Index* sebelumnya bahwa rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka melek huruf adalah presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Untuk menghitung indeks pendidikan, dipakai batasan sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf dipakai 100 sebagai batas maksimum dan angka 0 sebagai batas minimum. Angka 100 mencerminkan kondisi 100 persen semua masyarakat mampu membaca dan menulis dan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya (BPS).

2.5.2.4. *Hifdzu an-Nasl*

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kelangsungan keturunan yang

berkelanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia (Rafsanjani, 2014:49). Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifdzu an-nasl* antara lain sebagai berikut.

QS.an-Nur (24): 32. Perintah untuk Menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Wa ankihul ayāmā minkum waṣ ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā'ikum, iy yakūnū fuqurā'a yugnihimullāhu min faḍlih(ī), wallāhu wāsi'um'aliim(un).

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba shayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” QS.an-Nur (24): 32 (Depertemen RI(2012: 354).

Tafsir ayat di atas dalam Surin (2004: 1472), adalah ini suatu anjuran agar kemelaratan jangan dijadikan alasan tidak setanding. Standarisasi dalam soal kawin hanyalah kesucian, kepatuhan dan ketqwaan, itulah nilai manusia.

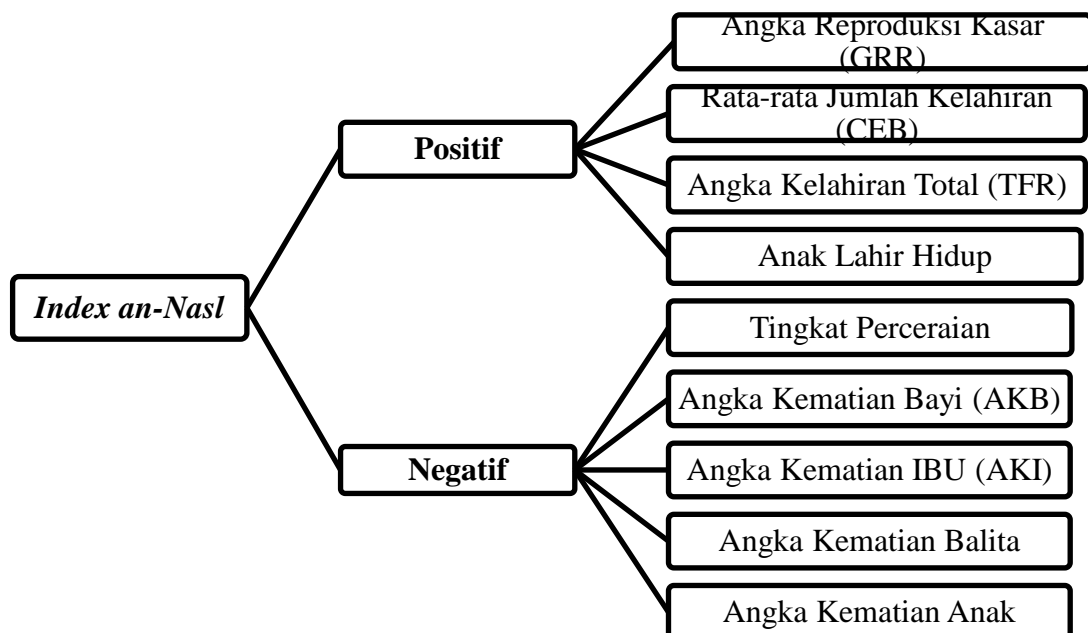
QS.an-Nisa'(4): 1. Allah memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَأَنْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ﴿١﴾

Yā ayyuhan nāsuttaqū rabbakumul laẓī khalaqakum min nafsiw wāḥidatiw wa khalaqa minhā waṣṣa minhumā rijālan kaṣīraw wa nisā'ā(n), wattaqullāhal laẓī tasā'alūna bihī wal arhām(a), innallāha kāna 'alaikum raqībā(n).

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan biakkan klaki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silahturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. QS.an-Nisa’(4): 1 (Departemen RI (2012: 77).

Untuk mengukur dimensi *hifdzu an-nasl*, maka di bentuk sebuah angka *index an-anasl* dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi *an-nasl*. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi *hifdzu an-nasl* diantaranya seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.6 di bawah ini.



Sumber: Dibangun dari tiga jurnal international

1. Anto, 2009. *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development un OIC Contries.*
2. Hapsari & Herianingrum, 2014. *Maqashid Index, a Succes Indicator of The Social Economic Development.*

3. Amin, Dkk. *A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development*.

Dalam Rafsanjani, 2014. *Analisis Islamic-Human Development Index di Indonesia*.

Gambar 2.6
Possible Indikator for Index an-Nasl

Berdasarkan pada Gambar 2.6 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang berdimensi positif terdiri dari: angka reproduksi kasar, rata-rata jumlah kelahiran, angka kelahiran total, dan anak lahir hidup. Beberapa indikator yang berdimensi negatif terdiri dari: tingkat, perceraian, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian anak. Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut di ambil dari 3 jurnal internasional, 1) Hapsari & Herianingrum, 2) Amin, Dkk, dan 3) Anto dalam Rafsanjani (2014), namun tidak semua dari beberapa indikator yang telah disebutkan diatas digunakan, adapun alasannya adalah 1) ketersediaan data, 2) beberapa data yang digunakan menyesuaikan dengan perhitungan HDI di Jawa Timur, sehingga ada beberapa indikator yang tidak bisa digunakan, oleh sebab itu dalam penelitian ini angka kematian bayi dan angka kelahiran total yang digunakan sebagai indikator dalam dimensi *an-nasl*, adapun penjelasannya sebagai berikut,

1) Angka Kelahiran Total

Angka kelahiran total merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur (Sirusa, BPS).

$$TFR = 5 \sum_{15-19}^{45-49} ASFR_i \quad (2.8)$$

Keterangan:

ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i

i : Kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

2) Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (Sirusa, BPS).

$$AKB_a = \frac{D_{0-<1 \text{ tahun}}}{JLH} \times 1000 \quad (2.9)$$

Keterangan:

$D_{0-<1 \text{ tahun}}$: Jumlah kematian penduduk usia 0-1 tahun
 JLH : Jumlah kelahiran hidup

2.5.2.5. *Hifdzu al-Maal*

Harta material (*maal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, rumah, kendaraan dll, untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, dll. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah (Rafsanjani, 2014:54-55). Berikut ini ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifdzu al-maal*.

QS. al-Jumu'ah (62): 10. Perintah untuk Mencari Karunia Allah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Fa iżā quḍiyatiṣ ṣalātu fantasyirū fil arḍi wabtagū min faḍlillāhi ważkurullahāha kaṣiiral la'allakum tuflihūna(a).

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. QS. al-Jumu’ah (62): 10 (Departemen RI (2012: 554)).

Berikut ini beberapa ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mendistribusikan kelebihan harta kepada orang-orang yang mengalami kekurangan terhadap harta, karena Islam tidak menghendaki terkonsentrasinya harta hanya kepada orang-orang kaya saja.

QS. al-Ma’arij (70): 24-25. Hak Orang Miskin terhadap Harta Orang Kaya

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Wal lazīna fī amwālihim ḥaqqum ma’lūm(un). Lis sā’ili wal maḥrūm(i),

Artinya: “(24) Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. (25) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. QS. al-Ma’arij (70): 24-25 (Departemen RI (2012: 569)).

QS. at-Thalaaq (65):7. Tentang perintah Memberikan Nafkah

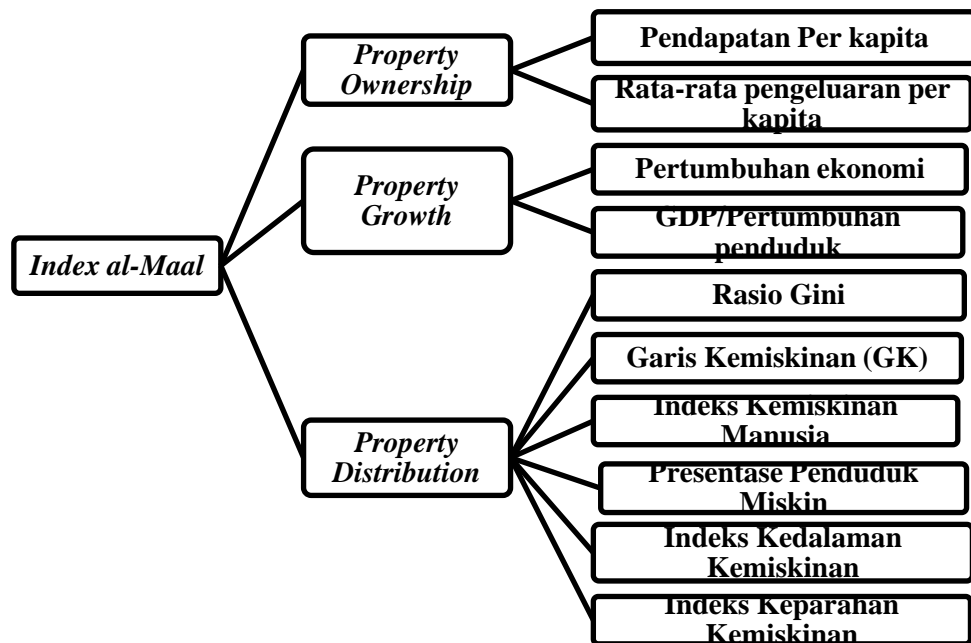
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Liyunfiq zū sa’atim min sa’atih(i), wa man qudira ‘alaihi rizquhū falyunfiq mimma ātāhullāh(u) lā yukallifullāhu nafsan illā mā ātāhā, sayal’alullāhu ba’dā ‘usriy yusrā(n)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. QS. at-Thalaaq (65):7 (Departemen RI (2012: 559)).

Tafsir ayat di atas dalam Surin (2004: 2441), maksudnya adalah orang yang miskin tidak dibebani tanggung jawab sama besar dengan orang kaya. Untuk mengukur dimensi *hifdzu al-maal*, maka di bentuk sebuah angka *index al-maal* dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi *al-maal*. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi *hifdzu al-maal* diantaranya seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.7.



Sumber: Dibangun dari tiga jurnal international

1. Anto, 2009. *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development un OIC Contries.*
2. Hapsari & Herianingrum, 2014. *Maqashid Index, a Succes Indicator of The Social Economic Development.*
3. Amin, Dkk. *A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development.*

Dalam Rafsanjani, 2014. *Analisis Islamic-Human Development Index di Indonesia.*

Gambar 2.7
Possible Indikator for Index al-Maal

Berdasarkan pada gambar 2.7 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk *index al-maal*. *Index al-maal*

merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Secara umum, indikator-indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu indikator yang mewakili kepemilikan atas harta, pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan.

Beberapa indikator yang mewakili kepemilikan harta yaitu pendapatan per kapita dan rata-rata pengeluaran per kapita. Indikator yang mewakili pertumbuhan pendapatan yaitu pertumbuhan ekonomi dan GDP/pertumbuhan penduduk. Indikator yang mewakili distribusi pendapatan yaitu: rasio gini, garis kemiskinan, indeks kemiskinan manusia, presentase Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut di ambil dari 3 jurnal internasional, 1) Hapsari & Herianingrum, 2) Amin, Dkk, dan 3) Anto dalam Rafsanjani (2014), namun tidak semua dari beberapa indikator yang telah disebutkan diatas digunakan, adapun alasannya adalah 1) ketersediaan data, 2) beberapa data yang digunakan menyesuaikan dengan perhitungan HDI di Jawa Timur, sehingga ada beberapa indikator yang tidak bisa digunakan, oleh sebab itu dalam penelitian ini Rata-rata pengeluaran perkapita (daya beli), indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan yang digunakan sebagai indikator dalam dimensi *al-maal*, adapun penjelasannya sebagai berikut,

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Angka yang didapatkan dari hasil perhitungannya menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi (Sirusa, BPS).

$$C_{(i)} = C_{(i)} \quad \text{jika } C_{(i)} \leq Z \quad (2.10)$$

$$= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} \quad \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z$$

$$= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} \quad \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z$$

$$= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} \quad \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z$$

Keterangan:

C(I): Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z: Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

Tabel 2.3
Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung
Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Sumbangan Terhadap Total Konsumsi (%) [*]	Komoditi	Unit	Sumbangan Terhadap Total Konsumsi (%) [*]
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Beras lokal	Kg	7.25	Pepaya	Kg	0.18
Tepung terigu	Kg	0.10	Kelapa	Butir	0.56
Ketela pohon	Kg	0.22	Gula pasir	Ons	1.61
Ikan tongkol/tuna/cakalang	Kg	0.50	Kopi bubuk	Ons	0.60
Ikan teri	Ons	0.32	Garam	Ons	0.15
Daging sapi	Kg	0.78	Merica/lada	Ons	0.13
Daging ayam kampung	Kg	0.65	Mie instant	80 gram	0.79
Telur ayam	Butir	1.48	Rokok kretek/filter	10 batang	2.86

Sumber: Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Indonesia.

Tabel 2.3
Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung
Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Sumbangan Terhadap Total Konsumsi (%) ^{*)}	Komoditi	Unit	Sumbangan Terhadap Total Konsumsi (%) ^{*)}
1	2	3	1	2	3
Susu kental manis	397 gram	0.48	Listrik	Kwh	2.06
Bayam	Kg	0.30	Air minum	M ³	0.46
Kacang panjang	Kg	0.32	Bensin	Liter	1.02
Kacang tanah	Kg	0.22	Minyak tanah	Liter	1.74
Tempe	Kg	0.79	Sewa rumah	Unit	11.56
Jeruk	Kg	0.39	T o t a l		37.52

Sumber: Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Indonesia.

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.3. Batas maksimum daya beli adalah besar RP. 300.000, dan sejak tahun 1999 batas minimum penghitungan PPP di ubah dan disepakati menjadi RP. 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi.

1) Rasio Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk (Sirusa, BPS).

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n (FC_i + FC_i - 1) \quad (2.11)$$

Keterangan:

GR : Koefisien gini

FP_i : Frekuensi penduduk dala kelas pengeluaran ke-i

FC_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

FC_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

2) Indeks kedalaman kemiskinan (P_1)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (Sirusa, BPS).

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \frac{Z - y_i}{Z} \quad (2.12)$$

Keterangan:

P_1 : Indeks kedalaman kemiskinan

Z : Garis kemiskinan

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

2.5.3. Metode Perhitungan *Islamic-Human Development Index (I-HDI)*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anto (2009) dan Rafsanjani (2014) untuk mengukur pembangunan manusia yaitu dengan menggunakan indikator-indikator yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya yang tertuang pada tabel 2.4, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.4
Kesejahteraan Holistik dengan Indikator yang Diusulkan

Kesejahteraan	Dimensi	Indeks Dimensi	Indikator
<i>Material Welfare Index (MWI)</i>	<i>Hifdzu al-Maal</i>	<i>Index al-Maal</i>	1. Pengeluaran per Kapita riil disesuaikan (PPP Rupiah) 2. Rasio Gini 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)
<i>Non-Material Welfare Index (NWI)</i>	<i>Hifdzu ad-Dien</i>	<i>Index ad-Dien</i>	1. Angka kriminalitas 2. Angka Partisipasi siswa sekolah agama
	<i>Hifdzu al-'Aql</i>	<i>Index al-'Aql</i>	1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata Lama Sekolah
	<i>Hifdzu an-Nafs</i>	<i>Index an-Nafs</i>	1. Angka Harapan Hidup
	<i>Hifdzu an-Nasl</i>	<i>Indexa an-Nasl</i>	1. Angka Kelahiran Total 2. Angka Kematian Bayi

Sumber: Anto, 2009. Intruduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries, disesuaikan dalam Rafsanjani, 2014. Analisis Islamic- Human Development Index (I-HDI) di Indonesia.

Berdasarkan pada tabel 2.4 dapat diketahui bahwa I-HDI mengukur pembangunan manusia yang mencakup baik kesejahteraan materi maupun non materi dengan lima dimensi *maqashid syariah* yang diukur melalui perhitungan index yang mewakili kelima dimensi tersebut. *Index al-maal*, mewakili dimensi materi diukur menggunakan data pengeluaran perkapita riil disesuaikan sebagai cerminan terhadap kepemilikan harta. Data rasio gini, dan indeks kedalaman kemiskinan juga digunakan sebagai cerminan terhadap pemerataan distribusi pendapatan. *Index ad-dien*, mewakili dimensi agama diukur menggunakan data angka kriminalitas. *Index al-'Aql*, mewakili dimensi pengetahuan diukur menggunakan data angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. *Index an-nafs*, mewakili dimensi kesehatan diukur menggunakan data angka harapan hidup. *Index an-nasl*, mewakili dimensi keturunan diukur menggunakan data angka kelahiran total dan angka kematian bayi.

Langkah yang harus dilakukan dalam perhitungan *Islamic Human Development* berdasarkan penelitian oleh Anto (2009) dan Rafsanajani (2014) yaitu dengan cara sebagai berikut.

Langkah *pertama*, menghitung indeksnya terlebih dahulu dari setiap masing-masing indikator yang mewakili dari kelima dimensi *maqashid syariah*.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Index Dimension} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai minimal}}{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai minimal}} \quad (2.13)$$

Keterangan:

Nilai Aktual : Komponen I-HDI ke-i

Nilai Maksimal: Nilai maksimum dari komponen I-HDI ke-i

Nilai Minimal : Nilai minimum dari komponen I-HDI ke i

Untuk menghitung indeks dari masing-masing komponen I-HDI, digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Indikator I-HDI

Dimensi	Komponen I-HDI	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Agama	1. Angka Kriminalitas 2. Angka partisipasi siswa sekolah agama	Aktual maksimum	Aktual minimum	-
Jiwa	1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Akal	1. Angka Melek Huruf 2. Rata-Rata Lama sekolah	100 15	0 0	Standar UNDP Standar UNDP
Keturunan	1. Angka Kelahiran Total 2. Angka Kematian Bayi	Aktual maksimum Aktual maksimum	Aktual minimum Aktual minimum	- -
Harta	1. Pengeluaran Per Kapita Riil 2. Indeks Gini 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	732.720 Aktual maksimum Aktual maksimum	360.000 Aktual minimum Aktual minimum	Standar Nasional - -

Sumber: BPS & UNDP, disesuaikan

Tabel 2.5 di atas merupakan tabel nilai maksimum dan minimum dari beberapa komponen I-HDI digunakan dalam perhitungan indeks. Berdasarkan pada tabel di atas, maka nilai maksimum dan nilai minimum dari beberapa komponen I-HDI telah sesuai dengan standar, baik standar internasional maupun standar nasional. Beberapa komponen yang menggunakan standar internasional UNDP yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Beberapa komponen yang menggunakan standar nasional perhitungan BPS yaitu pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Beberapa komponen yang belum memiliki standar, baik internasional maupun nasional yaitu: angka kriminalitas, angka kelahiran total, angka kematian bayi, indeks gini, dan indeks kedalaman kemiskinan. Berdasarkan pada hal itu, nilai maksimum dan minimum yang

digunakan adalah nilai terendah dan nilai tertinggi dari setiap masing-masing komponen I-HDI (Rafsanjani, 2014: 126).

Langkah *kedua*, yang dilakukan dalam perhitungan I-HDI yang dilakukan oleh Anto (2009) dan Rafsanjani (2014) yaitu dengan menghitung indeks dari kelima dimensi *maqashid syariah* menggunakan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun rumus dari perhitungan masing-masing kelima dimensi *maqashid syariah* adalah sebagai berikut.

1) *Index ad-Dien*

Untuk menghitung *index ad-dien*, menggunakan data kriminalitas dengan perhitungan sebagai berikut.

$$ID = \frac{\text{Aktual Crime} - \text{min Crime}}{\text{Max Crime} - \text{Min Crime}} \quad (2.14)$$

Keterangan:

ID	: <i>Index ad-Dien</i>
Akt.crime	: Nilai aktual kriminalitas ke i
Min crime	: Nilai terendah kriminalitas ke-i
Max Crime	: Nilai aktual tertinggi kriminalitas ke-i

2) *Index an-Nafs*

Untuk menghitung *index an-Nafs*, menggunakan data angka usia harapan hidup, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$INF = \frac{\text{Akt.Life Expectancy} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}} \quad (2.15)$$

Keterangan:

INF	: <i>Index an-Nafs</i>
Akt.LifeExpectancy	: Nilai aktual angka harapan hidup ke-i
Nilai minimum	: Nilai minimum dari komponen I-HDI
Nilai Max	: Nilai maksimal dari komponen I-HDI

3) *Index al-'Aql*

Nilai *index al-'Aql* dalam perhitungannya diperoleh dari gabungan dua data yang digabungkan dua data yang digunakan, yaitu digunakan data angka melek

huruf dan data rata-rata lama sekolah. Perhitungan *index al-'Aql* dilakukan seabgai berikut.

$$LI = \frac{\text{Actual Literacy}-\text{Nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum}-\text{Nilai Minimum}} \quad (2.16)$$

$$MYSI = \frac{\text{Actual MYSI}-\text{Nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum}-\text{Nilai Minimum}} \quad (2.17)$$

$$IA = \frac{1}{2} (LI) + \frac{1}{3} (MYSI) \quad (2.18)$$

Keteranngan:

IA	: <i>Index al-'Aql</i>
LI	: <i>Literacy Index</i> (angka melek huruf)
MYSI	: <i>Mean Years School Index</i> (Rata-rata Lama sekolah)
Akt.Lit	: Nilai aktual melek huruf ke-i
Akt.MYSI	: Nilai aktual Rata-Rata Lama Sekolah huruf ke-i
Nilai min	: Nilai Minimal dari komponen I-HDI
Nilai max	: Nilai Maksimal dari komponen I-HDI

4) *Index an-Nasl*

Perhiungan *index am-Nasl*, menggunakan dua gabungan data, yaitu data kelahiran total (*Fertilitas*) dan data kematian bayi (*mortalitas*). Perhitungan *index an-Nasl* akan dilakukan dengan rumus seabgai berikut.

$$FI = \frac{\text{Actual Fr}-\text{Nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum Fr}-\text{Nilai Minimum Fr}} \quad (2.19)$$

$$MI = \frac{\text{Actual Mr}-\text{Nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum Mr}-\text{Nilai Minimum Mr}} \quad (2.20)$$

$$INS = \frac{1}{2} (FI + MI) \quad (2.21)$$

Keterangan:

INS	: <i>Index an-Nasl</i>
FI	: <i>Fertility Index</i>
MI	: <i>Mortality Index</i>
Akt.Fr	: Nilai Aktual angka kelahiran total ke-i
Min Fr	: Nilai aktual terendah angka kelahiran total ke-i
Max Fr	: Niali aktual tertinggi angka kelahiran total ke-i
Min Mr	: Nilai aktual terendah angka kematian bayi ke-i
Max Fr	: Niali aktual tertinggi angka kematian bayi ke-i

5) *Index al-Maal*

Index al-Maal terbentuk dari gabungan dua indikator yaitu pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) sebagai cerminan terhadap kepemilikan harta dan *Distribution Equity Index* (DEI) yang terbentuk dari gabungan dua data, yaitu data indeks gini dan data indeks kedalaman kemiskinan sebagai cerminan terhadap pemerataan distribusi pendapatan. Untuk data Indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan, karena data yang dipakai sudah dalam bentuk angka indeks, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu akan menormalisasikan datanya terlebih dahulu dengan rumus $(\frac{100-Gc}{100})$, yang mana Gc adalah Gini di ukur dalam persentase. Jika Gini tidak dalam persentase, yaitu antara 0 dan 100, tetapi dalam bentuk desimal, maka normalisasi Gini hanya akan menjadi $1-Gc$. Sehingga perhitungan *index al-maal* sebagai berikut.

$$nGc = 1-Gc \quad (2.22)$$

$$GcI = \frac{\text{Aktual } nGc - \text{Minimal } nGc}{\text{Maksimal } nGc - \text{Minimal } nGc} \quad (2.23)$$

$$nP_1 = 100 - P_1 \quad (2.24)$$

$$P_1 = \frac{\text{Aktual } nP_1 - \text{Minimal } nP_1}{\text{Maksimal } nP_1 - \text{Minimal } nP_1} \quad (2.25)$$

Setelah data Indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan telah dinormalisasikan dan dirubah kembali menjadi angka indeks, maka kedua data tersebut digabung menjadi satu dan di sebut dengan *Distributional Equity Index* (DEI) dengan perhitungan sebagai berikut.

$$DEI = \frac{1}{2} (GcI + P_1) \quad (2.26)$$

Langkah selanjutnya merubaha data pengeluaran per kapita disesuaikan (PP) menjadi angka indeks dan kemudian menggabungkannya dengan *Distributional Equity Index* (DEI) membentuk *index al-Maal*, dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\mathbf{PPI} = \frac{\mathbf{Aktual\ PP - Minimal\ PP}}{\mathbf{Maksimal\ PP - Minimal\ PP}} \quad (2.27)$$

$$\mathbf{IM} = \frac{1}{2}(\mathbf{DEI} + \mathbf{PPI}) \quad (2.28)$$

Keterangan:

- IM : *Index al-Maal*
- DEI : *Distributional Equity Index*
- PPI : *Pengeluaran per kapita Index*
- nGc : *Normalized Gini Coefficient*
- Gc : *Gini Coefficient*
- GcI : *Gini Coefficient Index*
- P₁ : *Indeks Kedalaman Kemiskinan*

Setelah nilai dari kelima indeks dimensi telah diketahui, langkah *ketiga*, yaitu menghitung nilai *Islamic Human Development Index* (I-HDI), *Material Walfare Index* (MWI), dan *Non Material Walfare Index* (NWI) dapat dihitung dengan rumus perhitungan rata-rata aritmatika sebagai berikut.

$$\mathbf{I-HDI} = \frac{2}{5}(\mathbf{ID}) + \frac{1}{5}(\mathbf{INF} + \mathbf{IA} + \mathbf{INS} + \mathbf{IM}) \times \mathbf{100} \quad (2.29)$$

$$\mathbf{MWI} = \frac{1}{2}(\mathbf{DEI} + \mathbf{PPI}) \quad (2.30)$$

$$\mathbf{NWI} = \frac{1}{4}(\mathbf{ID} + \mathbf{INF} + \mathbf{IA} + \mathbf{INS}) \quad (2.31)$$

Keterangan:

- I-HDI : *Islamic Human Development Index*
- MWI : *Material Walfare Index*
- NWI : *Non – Material Walfare Index*
- ID : *Index ad-Dien*
- INF : *Index an-Nafs*
- IA : *Index al- 'Aql*
- INS : *Index an-Nasl*
- IM : *Index al-Maal*

DEI : *Distributional Equity Index*
 PPI : Pengeluaran per kapita Index

2.6. Perbedaan HDI dan I-HDI

HDI dan I-HDI merupakan alat ukur dalam penghitung pencapaian pembangunan manusia, hanya saja memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang terdapat dalam dua alat ukur tersebut adalah indikator pembentuknya., adapun berikut ini merupakan perbedaannya.

Tabel 2.6
 Perbedaan Indikator HDI dan I-HDI

ALAT UKUR PEMBANGUNAN MANUSIA							
HDI			I-HDI				
DIMENSI							
KESEHATAN	PENDIDIKAN	EKONOMI (DAYA BELI)	AD-DIEN	AN-NAFS	AL-AQL	AN-NASL	AL-MAAL
INDIKATOR							
Angka Harapan Hidup	Angka Melek huruf dan rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita (d disesuaikan)	Angka Krimin alitas dan Angka Partisi pasi Siswa Sekolah agama	Angka Harapan Hidup	Angka Melek huruf dan rata-rata Lama Sekolah	Angka Kelahiran Total dan Kematian Bayi	Pengeluaran Perkapita (d disesuaikan), Indeks Gini dan Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Anto, 2009. *Intruduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*, disesuaikan dalam Rafsanjani, 2014. Analisis Islamic- Human Development Index (I-HDI) di Indonesia.

2.8. Penelitian Sebelumnya

Terdapat lima penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya tiga jurnal dan satu tesis yang membahas tentang I-HDI dan satu jurnal yang membahas tentang HDI. Pertama, jurnal penelitian oleh Anto, MB Hendrie 2009. *Intruducing an Islamic Human Development Index to Measure Development in OIC Countries*. Jurnal ini membahas tentang *Islamic Human Developmet Index*. Pembahasan pertama di mulai dengan membangun sebuah pengukuran baru tentang pembangunan manusia, yang mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam. Lima dimensi *maqashid syariah* dipakai dalam komponen perhitungan I-HDI, antara lain: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain memakai komponen lima dimensi *maqashid syariah*, pada jurnal ini juga digunakan indikator lain seperti keadilan dan kebebasan. Berikut indeks dimensi dengan indikator yang diusulkan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut.

1. *Faith Index*: Jumlah masjid, puasa, zakat, haji, dana amal, tingkat kriminalitas
2. *Life Index*: usia harapan hidup, penggunaan narkoba dan perokok.
3. *Science Index*: tingkat pendidikan, jumlah lembaga pendidikan, angka melek huruf, dan jumlah hak paten.
4. *Family-social Index* : jumlah keluarga, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat perceraian.
5. *Property Index*: GDP per kapita, pertumbuhan ekonomi, GDP pertumbuhan penduduk, rasio gini, dan tingkat kemiskinan.
6. *Others*: kebebasan berpolitik =, kebebasan eonomi, dan emisi CO2.

Jurnal kedua, oleh Amin, Dkk., *The Integrated Development Index: a New Comprehensive Approach to Measuring Human Development*, Jurnal ini mengkaji tentang *Integrated Development Inde* (I-DEX), yaitu suatu pendekatan baru yang

digunakan untuk mengukur pembangunan manusia secara lebih komprehensif. Pembahasan diawali dengan mendeskripsikan latar belakang pentingnya bagi negara-negara Islam untuk membangun sebuah pengukuran baru yang lebih komprehensif dengan memasukkan nilai-nilai agama di dalam pendekatannya. Pembahasan dilanjutkan dengan mendeskripsikan sejarah perkembangan *Human Development Index*.

Intregeted Development Index (I-DEX) pada jurnal ini dibangun berdasarkan teori *maqashid syariah* oleh Imam al-Gzali. Pemikiran Imam al-Gazhali tentang *maqashid syariah* yang kemudian telah disempurnakan oleh Juwaini, mengelompokkan *mshahah* menjadi tiga: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyaat*, yang mana kebutuhan *dharuriyat* mencakup lima dimensi, yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka I-Dex dapat dibangun seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.7
Dimensi *Maqashid Syariah*

NO	<i>Maqashid Syariah</i>	Dimensi	<i>Possible Element</i>
1	<i>Hifdzu ad-Dien</i>	Pengayaan spritual	Pendaftaran sekolah agama
		Standar moral yang baik	Tingkat korupsi, charity, pelayanan sosial/ pekerjaan sukarela
		Praktek Agama	Melakukan shalat, membayar zakat

Sumber: Ruzita Mohd Amin, DKK., *The Integrated Development Index: a New Comprehensive Approach to Measuring Human Development*

Tabel 2.7
Dimensi *Maqashid Syariah*

		Memenuhi 1 menit kebutuhan dasar (fisik)	Penyediaan makanan, air, listrik, fasilitas, kesehatan, perumahan
		Memenuhi 1 menit kebutuhan dasar (spiritual)	Pendidikan (agama dan non agama)
2	<i>Hifdzu an-Nafs</i>	Memenuhi 1 menit kebutuhan moral	Pemerintahan yang baik, HAM, keadilan, kebebasan politik
		Memenuhi 1 menit kebutuhan sosial	Keadilan sosial, pernikahan/ keluarga, kehidupan masyarakat
		Perlindungan dari ancaman (manusia)	Keamanan publik, stabilitas politik dan keamanan
		Perlindungan dari ancaman (non manusia)	Pencegahan kesehatan, pelayanan media
		Memanfaatkan akal	Ketenagakerjaan, peluang penelitian, kebebasan berbicara dan berfikir
3	<i>Hifdzu al-'Aql</i>	Memanfaatkan akal (fisik otak)	Kesehatan, penyediaan makanan sehat dan minuman, pencemaran lingkungan
		Memanfaatkan akal (mental)	Kesehatan mental, pendidikan, akses ke internet
		Menjaga pikiran dari pengaruh negatif	Media, tindakan terhadap minuman keras, pidana/kegiatan ilegal
		Kelangsungan hidup	Pernikahan/keluarga, keamanan publik, keamanan hidup
4	<i>Hifdzu an-Nasl</i>	Perlindungan generasi masa depan	Kelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi
		Perlindungan keturunan	Kesehatan reproduksi, kematian anak
		Pengembangan generasi mendatang	Pendidikan, literasi
		Perlindungan Kepemilikan	Hak milik/kepemilikan, akses ke peradilan, perundang
		Perlindungan kekayaan dari kerusakan	Asuransi
5	<i>Hifdzu al-Maal</i>	Pelestarian kekayaan melalui nilainya	Stabilitas harga
		Pelestarian kekayaan melalui peredarannya	Lembaga keuangan
		Pengembangan kekayaan	UU ketenagakerjaan, ketersediaan kekayaan

Sumber: Ruzita Mohd Amin, DKK., *The Integrated Development Index: a New Comprehensive Approach to Measuring Human Development*

Jurnal berikutnya oleh Hapsari, M.I. & Herianingrum, S. 2014. *Maqashid Index, a Success Indikator of The Social Economic Development*, Jurnal ini bertujuan untuk merumuskan indeks kesejahteraan manusia yang mengacu pada *maqashid syariah*. Sebuah kegiatan ekonomi dianggap mencapai kemakmuran adaah ketika kegiatan dalam mencapai target tidak meninggalkan satu dimensi *maqashid*, seperti perlindungan terhadap agama (*hifdzu ad-dien*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu an0nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdzu al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdzu al-maal*). Pembentukan indeks dilakukan dengan membuat sebuah model matematis dan bobot indikator, Berikut Indeks dimensi dengan indikator yang diusulkan dalam penelitian ini.

1. *Hifdzu ad-Dien*: Jumlah masjid, puasa zakat, haji, jumlah ulama dan angka melek huruf arab
2. *Hifdzu an-Nafs*: *homecide index* dan *health index*
3. *Hifdzu al-‘Aql*: angka melek huruf, tingkat pendidikan, dan jumlah pendidikan dasar.
4. *Hifdzu an-Nasl*: jumlah aktual keluarga, tingkat kelahiran anak, tingkat kematian bayi, dan tingkat perceraian.
5. *Hifdzu al-Maal*: *property ownership, property grwth, property distribution*.

Berikutnya yaitu penelitian oleh Rafsanjani, Haqiqi. 2014. Analisis *Islamic-Human Development Index* di Indonesia, Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran I-HDI yang dilakukan di 33 pronvinsi di Indonesia selama tahun 2010-2013, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hasil pencapaian pembangunan dari 33 provinsi di Indonesia yang diukur dengan

perhitungan I-HDI menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masuk dalam kategori pencapaian pembangunan menengah bawah (jika di ukur dengan skala internasional). Hasil perhitungan juga menunjukkan disparitas yang sangat jauh antara peringkat I-HDI tertinggi dengan peringkat I-HDI terendah.

Berikutnya yaitu jurnal penelitian oleh Stanto, Elizabeth A. 2007. *The Human Development Index: a History* jurnal ini membahas tentang sejarah konsep pengukuran *Human Development Index* oleh UNDP. Pembahasan diawali dengan mendeskripsikan tiga revolusi berturut-turut tentang tentang pemikiran pengukuran kesejahteraan manusia. Ketiga revolusi tersebut yaitu revolusi marginalis, revolusi ordinalis, dan revolusi humanis. Ketiga revolusi tersebut berkembang dari pemikiran ekonomi neo-klasik tentang “utilitas”, yaitu tingkat kepuasan yang diperoleh individu dalam konsumsi. Pembahasan kedua dalam jurnal ini mendeskripsikan pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Mahbub ul Haq, sebagai cikal bakal terbentuknya HDI yang di pakai UNDP dalam mengukur pembangunan manusia.

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang dijelaskan dalam tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.8
Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Sekarang

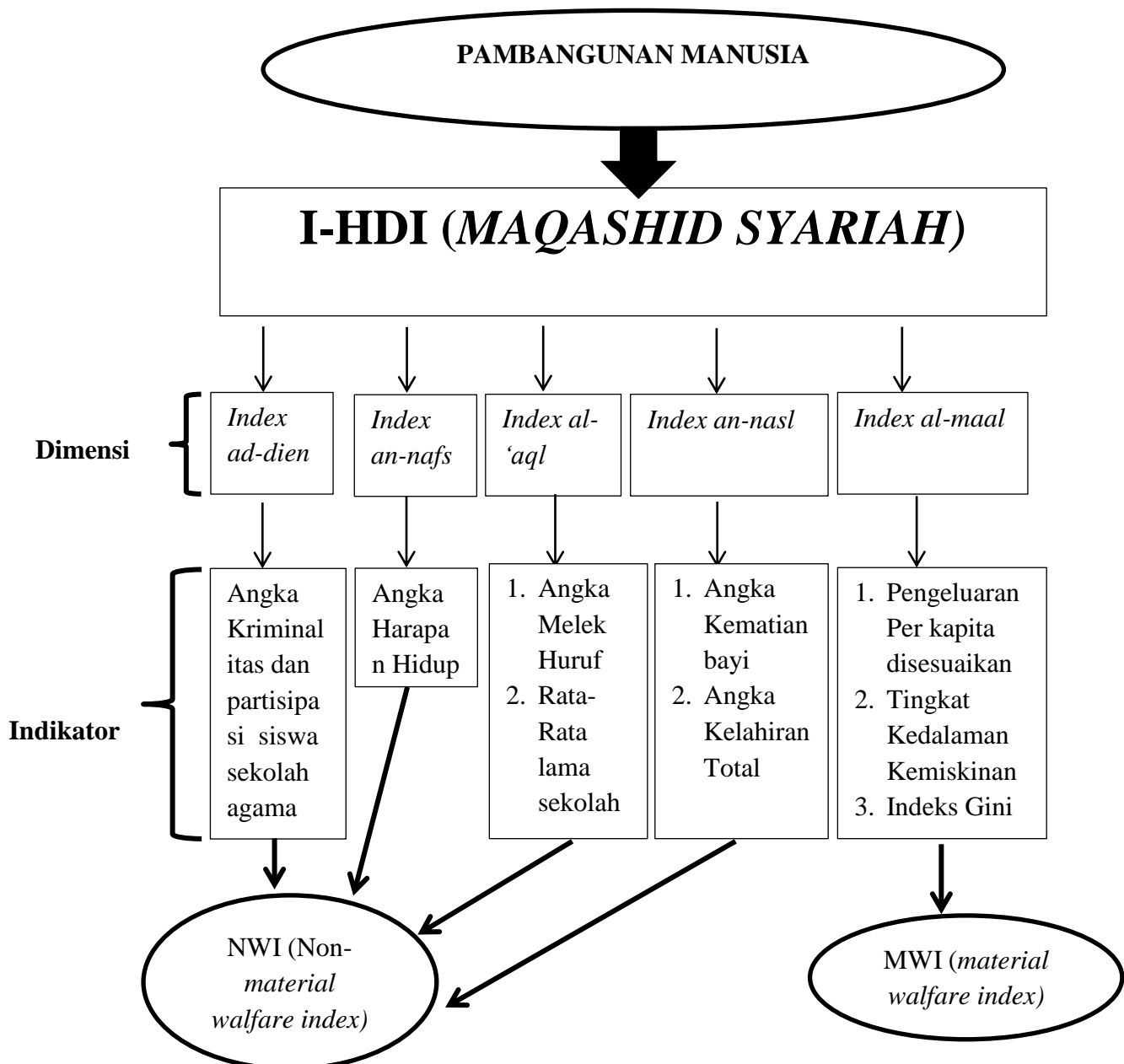
Penelitian	Perbedaan	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
MB Hendrie Anto	Obyek penelitian	Studi kasus di Negara OKI	Studi kasus di Provinsi Jawa Timur
	Indikator dimensi agama	<i>Corruption Perception Index (CPI)</i>	Angka Kriminalitas dan Angka partisipasi siswa sekolah Agama
Ruzita Mohd Amin, Dkk.	Tujuan penelitian	Membangun konsep pengukuran <i>Islamic Human Development Index</i>	1. Mengaplikasikannya untuk mengukur pembangunan manusia di Jawa Timur 2. Membandingkan hasil perhitungan HDI dan I-HDI
Meri I.H & Sri.H	Tujuan Penelitian	Membangun konsep pengukuran <i>Islamic Human Development Index</i>	1. Mengaplikasikannya untuk mengukur pembangunan manusia di Jawa Timur 2. Membandingkan hasil perhitungan HDI dan I-HDI
Haqiqi Rafsanjani	Obyek penelitian	Studi kasus di Negara Indonesia	Studi kasus di Provinsi Jawa Timur
	Indikator dimensi agama	Angka kriminalitas	Angka Kriminalitas dan Angka partisipasi siswa sekolah Agama
Elizabeth A. Santoso	Fokus penelitian	<i>Human Development Index</i>	<i>Islamic-Human Development Index</i>

Sumber: Diolah peneliti dari empat penelitian.

1. Anto, 2009. *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development un OIC Contries.*
2. Hapsari & Herianingrum, 2014. *Maqashid Index, a Succes Indicator of The Social Economic Development.*
3. Amin, Dkk. *A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development.*
4. Rafsanjani, 2014. *Analisis Islamic-Human Development Index di Indonesia.*

5. Stanton, E. 2007. *The Human Development Index: a History*. Universitas of Massachusetts Amherst, Political Economy Research Institute (PERI).

2.8. Kerangka Berfikir



Gambar 2.8
Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, atau paradigma *interpretatif* dan *konstruktif*, yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, bukan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2013:9).

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Menurut Vardiansah dalam Leksono (2013:181) penelitian deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Berdasarkan pada hal itu, maka yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjekaskan pemahaman tertentu.

Alasan pemilihan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencapaian pembangunan manusia dari hasil pengukuran I-HDI di Jawa Timur periode 2010-2014 dengan menggunakan data

sekunder, yaitu berupa data-data statistik sosial-ekonomi (angka kriminalitas, angka partisipasi siswa sekolah agama, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka kematian bayi, angka kelahiran total, daya beli, indeks gini, tingkat kedalaman kemiskinan, dan indeks demokrasi) yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jawa Timur periode 2010-2014.

3.2. Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu pengamatan selama lima tahun yang selama periode 2010-2014, dan yang menjadi obyek penelitian adalah 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, diantaranya seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Obyek Penelitian

No	Kota/Kabupaten	No	Kota/Kabupaten	No	Kota/Kabupaten
1	Pacitan	14	Pasuruan	27	Sampang
2	Ponorogo	15	Sidoarjo	28	Pamekasan
3	Trenggalek	16	Mojokerto	29	Sumenep
4	Tulungagung	17	Jombang	30	Kota Kediri
5	Blitar	18	Nganjuk	31	Kota Blitar
6	Kediri	19	Madiun	32	Kota Malang
7	Malang	20	Magetan	33	Kota Probolinggo
8	Lumajang	21	Ngawi	34	Kota Pasuruan
9	Jember	22	Bojonegoro	35	Kota Mojokerto
10	Banyuwangi	23	Tuban	36	Kota Madiun

11	Bondowoso	24	Lamongan	37	Kota Surabaya
12	Situbondo	25	Gresik	38	Kota Batu
13	Probolinggo	26	Bangkalan		

3.3. Fokus Penelitian

Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif yang di maksud adalah membatasi studi kualitatif (Moeleong, 2004: 94), maksudnya adalah bahwa penentuan fokus penelitian diperlukan untuk membatasi studi kualitatif agar pembahasannya tetap fokus pada permasalahan yang sedang diteliti, bukan sebaliknya. Fokus dalam studi kualitatif ini adalah pencapaian pembangunan manusia 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang diukur dengan I-HDI

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013: 225). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sata statistik sosial-ekonomi dari 37 kota/kabupaten di Jawa Timur periode 2010-2014. Beberapa yang diambil meliputi:

1. Angka kriminalitas
2. Angka Partisipasi Siswa Sekolah Agama
3. Angka harapan hidup
4. AngkaS melek hurug
5. Rata-rata lama sekolah
6. Angka kelahiran total

7. Angka kematian bayi
8. Pengeluaran perkapita riil disesuaikan
9. Indeks gini
10. Indeks kedalaman kemiskinan
11. Indeks demokrasi
12. Indeks pembangunan manusia

Data angka kelahiran total disesuaikan dengan angka kematian bayi, *islamic human development index*, *material welfare* dan *non-material welfare* dalam penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan indeks dengan menggunakan data-data tersebut di atas.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumenter. Teknik dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat subyek sendiri atau oleh orang lain. Moleong dalam Herdiansyah (2010: 143), menggunakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan studi dokumentasi, yaitu:

1. Dokumentasi pribadi

Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh sudut pandang orisisnil dari kejadian situasi nyata.

2. Dokumen resmi

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2010: 145-146). Dokumen resmi dapat dibagi kedalam dua bagian. 1) dokumen internal, yaitu dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan dll. 2) dokumentasi eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga seperti, majalah, koran, bulletin, dll.

Adapun bentuk dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi eksternal, karena dokumen yang diambil berupa data-data statistik sosial ekonomi Jawa Timur yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Lebih lanjut Miles dan Hubberman dalam bukunya Sugiyono, 2013: 246-252, mengemukakan bahwa analisis dengan menggunakan analisis model interaktif dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013: 248, menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan (*verifikasi*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013: 248, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu menentukan pencapaian pembangunan kabupaten/kota di Jawa Timur dari hasil perhitungan I-HDI. Mengklasifikasikan hasil tersebut dengan skala pencapaian internasional yang terdiri dari empat kategori sebagai berikut.

Tabel 3.2
Klasifikasi daerah berdasarkan besarnya angka I-HDI

STATUS I-HDI	KISARAN ANGKA
Tinggi	$I-HDI > 80$
Menengah Atas	$66 < I-HDI < 80$
Menengah Bawah	$50 < I-HDI < 66$
Rendah	$I-HDI < 50$

Sumber: UNDP (2004) disesuaikan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Propinsi Jawa Timur

4.1.1. Kependudukan

Hasil proyeksi penduduk tahun 2014, jumlah penduduk di Jawa Timur adalah 38.610.202 jiwa dan jumlah rumah tangga sebesar 10.690.544 rumah tangga, sehingga rata-rata banyaknya penduduk per rumah tangga adalah 3,61 atau rata-rata 3-4 orang per rumah tangga. Dengan luas wilayah daratan Jawa Timur yaitu 46.428 kilometer persegi, maka tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2014 adalah 832 jiwa per kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2013, maka ada peningkatan sebesar 6 jiwa per kilometer persegi (Hasil Sensus Penduduk 2014, BPS Jatim)

Komposisi tren penduduk Jawa Timur menurut umur dan jenis kelamin mulai dari tahun 2010-2014 dapat digambarkan dengan lebih jelas dalam tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini.

Tabel 4.1
Penduduk menurut jenis kelamin dan *sex ratio* di Jawa Timur 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk			<i>Sex Ratio</i> (%)
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L+P (juta)	
2010	49,28	50,72	37,56	97,16
2011	49,3	50,7	37,84	97,24
2012	49,32	50,68	38,1	97,3
2013	49,33	50,67	38,36	97,36
2014	49,34	50,66	38,61	97,36

Sumber: Proyeksi pendudu

Berdasarkan pada tabel 4.1, terlihat dalam rentang waktu 2010-2014, terdapat tren peningkatan persentase penduduk laki-laki, yaitu dari 49,28 persen di

tahun 2010 menjadi 49,34 persen di tahun 2014. Walaupun ada kecenderungan penurunan, namun persentase penduduk perempuan di Jawa Timur tahun 2014 masih lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 50,66 persen. Sehingga bila dilihat berdasarkan rasio jenis kelamin (sex ratio), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Jawa Timur tahun 2014 diperoleh nilai 97,36 persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 97-98 penduduk laki-laki. Terdapat beberapa sebab sex ratio kurang dari 100 persen, di antaranya angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki serta karena migrasi penduduk laki-laki terutama pada penduduk di usia produktif.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota,
Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			Jumlah
	Laki – laki + Perempuan			
	0 - 14	15 - 64	65 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1 Pacitan	22,24	66,37	11,38	100,00
2 Ponorogo	21,88	67,42	10,70	100,00
3 Trenggalek	22,31	69,08	8,61	100,00
4 Tulungagung	23,76	67,83	8,41	100,00
5 Blitar	24,12	66,87	9,01	100,00
6 Kediri	25,54	66,85	7,61	100,00
7 Malang	24,14	68,27	7,60	100,00
8 Lumajang	23,67	68,98	7,35	100,00
9 Jember	25,80	66,90	7,30	100,00
10 Banyuwangi	24,36	67,73	7,91	100,00
11 Bondowoso	24,08	67,69	8,23	100,00
12 Situbondo	22,33	70,21	7,45	100,00
13 Probolinggo	24,68	68,84	6,48	100,00
14 Pasuruan	25,69	69,69	4,62	100,00
15 Sidoarjo	26,22	70,00	3,78	100,00
16 Mojokerto	25,15	69,16	5,70	100,00
17 Jombang	26,23	67,31	6,46	100,00
18 Nganjuk	24,26	67,53	8,22	100,00
19 Madiun	22,93	67,33	9,74	100,00
20 Magetan	21,46	67,46	11,08	100,00
21 Ngawi	23,05	67,61	9,34	100,00
22 Bojonegoro	23,67	68,05	8,28	100,00
23 Tuban	23,12	70,08	6,80	100,00
24 Lamongan	24,18	68,12	7,71	100,00
25 Gresik	26,67	68,79	4,53	100,00
26 Bangkalan	29,63	64,16	6,20	100,00
27 Sampang	30,66	64,36	4,98	100,00
28 Pamekasan	26,77	67,86	5,37	100,00
29 Sumenep	22,55	70,57	6,87	100,00
Kota				
71 Kediri	24,77	69,67	5,57	100,00
72 Blitar	25,60	67,55	6,85	100,00
73 Malang	22,64	71,88	5,47	100,00
74 Probolinggo	26,53	68,49	4,98	100,00
75 Pasuruan	27,45	68,21	4,33	100,00
76 Mojokerto	25,61	69,01	5,37	100,00
77 Madiun	22,92	69,12	7,95	100,00
78 Surabaya	23,75	71,87	4,38	100,00
79 Batu	24,25	69,07	6,68	100,00
Jawa Timur	24,66	68,44	6,90	100,00

Sumber: Laporan Susenas Jatim 2014, BPS.

Berdasarkan tabel 4.2 ada sekitar 68,44 persen penduduk di Jawa Timur tahun 2014 masuk di usia produktif (umur 15-64 tahun), sehingga ada sebanyak 31,56 persen berada pada kelompok usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), sementara dari data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa angka ketergantungan (*age dependency ratio*) penduduk Jawa Timur tahun 2014 sebesar 46,11 persen, ini berarti bahwa secara hipotesis setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46-47 orang penduduk usia tidak produktif.

Implikasi dari hasil data tersebut adalah besarnya presentase penduduk yang bersiap memasuki batas usia kerja (*economically active populations*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Berdasarkan pada jumlah penduduk usia produktif yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

4.1.2. Kondisi Sosial

4.1.2.1. Kondisi Kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar manusia dan merupakan salah satu aspek penentu kualitas sumber daya manusia yang penting untuk dicermati. Sumber daya manusia yang sehat secara fisik diharapkan akan baik pula dari sisi kualitas, terutama untuk berkiprah dalam pembangunan agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Melalui pembangunan bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang memadai dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (BPS).

Indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai obyek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa dan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat kesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia dibidang kesehatan, diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Hal tersebut menyebabkan penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk dievaluasi.

4.1.2.1.1. Indikator Kesehatan

Upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di Jawa Timur selama dapat diakui telah memberikan kontribusi secara perlahan terhadap peningkatan indikator derajat kesehatan masyarakat. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut. Kemajuan derajat kesehatan dan kualitas hidup penduduk dapat diketahui secara berkesinambungan melalui indikator kesehatan berikut ini.

Tabel 4.3
Indikator Kesehatan di Jawa Timur, Tahun 2010-2014

No	Indikator kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan lalu	28,46	27,2	26,93	27,37	28,21
2	Persentase penduduk yang mengalami keluhan sebulan lalu dan mengobati sendiri	61,66	63,42	64,12	61,22	59,31

Sumber : Hasil Susenas Jawa Timur 2010-2014

Tabel 4.3
Indikator Kesehatan di Jawa Timur, Tahun 2010-2014

No	Indikator kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014
3	Persentase penduduk yang mengalami keluhan sebulan lalu dan mengobati dengan cara tradisional	33,24	29,49	28,12	25,2	25,74
4	Persentase penduduk yang mengalami keluhan dan berobat jalan sebulan yang lalu	47,62	46,97	45,65	49,02	50,75
5	Persentase Balita Menurut Penolong kelahiran terakhir oleh tenaga medis	88,78	90,7	93,13	93,95	94,29
6	Persentase Balita Menurut Penolong kelahiran terakhir oleh tenaga non medis	11,22	9,31	6,86	6,05	5,71
7	Persentase Balita yang mendapat imunisasi lengkap	52,4	49,76	53,51	59,42	65,85
8	Persentase Pasangan usia Subur (PUS) yang pernah menggunakan alat KB	81,43	82,74	83,53	84,1	83,66
9	Persentase Pasangan usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat KB	64,16	64,89	65,68	66,48	65,33
10	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	29,99	29,24	28,31	27,23	26,66
11	Angka Harapan Hidup(e0) (Tahun)	69,6	69,81	70,09	70,19	70,45

Sumber : Hasil Susenas Jawa Timur 2010-2014

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengalami penurunan dan peningkatan, seperti di tahun 2010 yang sebesar 28,46% menurun menjadi 27,2% dan 26,93% di tahun 2011 dan 2012 kemudian meningkat di tahun 2013 dan 2014 menjadi 27,32% dan 28,21%. Sementara itu, persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan mengalami tren peningkatan dari tahun 2010-2014 yaitu sebesar 88,78%, 90,7%, 93,13%, 93,95%, 94,29%. Kemudian untuk indikator balita mendapat imunisasi lengkap mengalami tren peningkatan mulai dari tahun 2011-2014 yaitu sebesar 49,76%, 53,51%, 59,42%, 65,85%.

4.1.2.1.2. Situasi Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya merupakan komponen *input* dari pelayanan kesehatan dalam konteks sebagai suatu sistem. Komponen ini merupakan modal utama yang mutlak diperlukan untuk dapat melakukan proses pelayanan. Secara logis, jika

daya dukung komponen sumber daya tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup maka proses pelayanan seharusnya dapat dilakukan secara optimal.

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Berdasarkan hal itu, maka penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk dievaluasi.

Tabel 4.4
Sumber Daya Kesehatan di Jawa Timur, Tahun 2010-2014

NO	Sumber Daya Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rumah Sakit (unit)	309	290	304	258	334
2	Puskesmas (unit)	4286	4391	4272	4365	4445
3	Posyandu (unit)	45603	45637	45927	46016	46023
4	Pos Bersalin (unit)	5775	3339	4600	5775	5976
5	Tenaga Kerja Kesehatan (orang)	11936	25338	25604	25970	26102

Sumber: BPS Jatim

Berdasarkan pada tabel 4.4 terlihat bahwa secara umum sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan sumber daya kesehatan di semua elemen, hanya saja pada tahun 2011 dan 2013 untuk jumlah rumah sakit, dari 309 unit di tahun 2010 menjadi 290 di tahun 2011, lalu dari 304 unit di tahun 2012 menjadi 258 unit di tahun 2013. Juga penurunan pada jumlah puskesmas di tahun 2012.

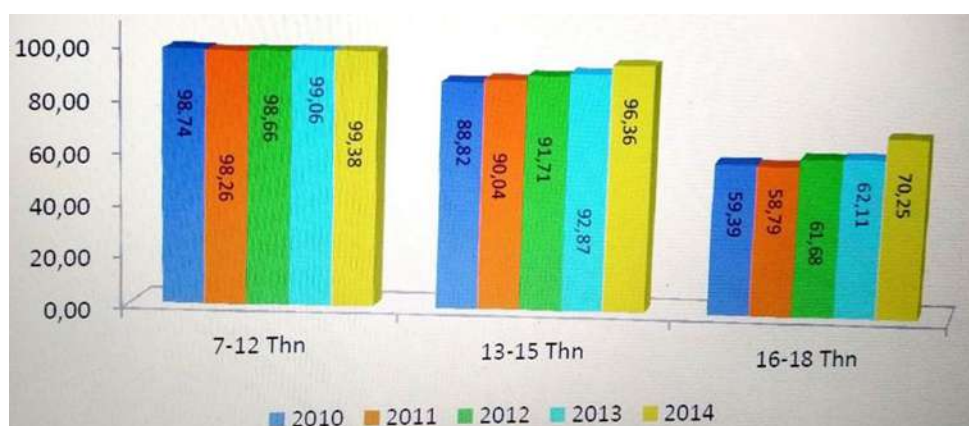
4.1.2.2. Kondisi Pendidikan

Sumber daya manusia yang baik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sebagai satu aspek penting dalam proses pengembangan pola pikir konstruktif dan

kreatif sumber daya manusia, pendidikan mutlak diperlukan, oleh sebab itu untuk memenuhi aspek pendidikan tersebut di Jawa Timur, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan perluasan jangkauan pelayanan pendidikan. Secara sederhana indikator keberhasilan pembangunan di bidang ini di lihat dari banyaknya penduduk yang buta huruf dari tingkat partisipasi sekolah. Komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah sangat berperan penting dalam memberantas buta huruf di Jawa Timur.

4.1.2.2.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi dapat menjadi indikator proses di bidang pendidikan, yang menggambarkan proses partisipasi aktif penduduk usia belajar dalam proses belajar (BPS). Secara umum, kondisi APS di Jawa Timur mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan tren ke arah peningkatan. Meningkatnya APS ini terjadi pada semua kelompok usia sekolah yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP) dan 16-18(SLTA), berikut penjelasan dalam gambar.



Sumber: Laporan Eksekutif Pendidikan Jatim 2014

Gambar 4.1
APS 7-12 Tahun, APS 13-15 Tahun, APS 16-18 Tahun di Provinsi di Jawa Timur 2010-2014 (Persen)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa APS 7-12 tahun, adanya peningkatan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut yang masih sekolah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010-2012 APS 7-12 tahun Jawa Timur berada pada kisaran 98 persen, dan meningkat menjadi 99,06 persen pada tahun 2013. APS kelompok usia 7-12 tahun kembali menunjukkan peningkatan sebesar 0,32 persen poin menjadi 99,38 persen di tahun 2014. Artinya masih ada sebesar 0,62 persen pada kelompok usia 7-12 tahun yang belum/tidak berada di bangku pendidikan sekolah formal. Kemudian pada APS kelompok usia 13-15 tahun mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 7,54 persen poin dari 88,82 persen pada tahun 2010 menjadi 96,36 persen pada tahun 2014. Hal tersebut merupakan suatu prestasi yang bagus karena adanya penurunan tingkat persentase kelompok usia 13-15 tahun yang tidak sedang sekolah dari sekitar 12 persen pada tahun 2010 hingga menjadi empat persen pada tahun 2014. APS kelompok usia 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, sebesar 10,36 persen poin yaitu dari 59,39 persen pada tahun 2010 menjadi 70, 25 persen pada tahun 2014. Artinya kesadaran anak pada kelompok usia ini untuk bersekolah meningkat, walaupun demikian masih ada sekitar 30 persen anak pada kelompok usia ini pada 2014 yang tidak bersekolah.

4.1.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK

menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.5
APK Menurut Jenjang Pendidikan di Jawa Timur, Tahun 2010-2014

No	Partisipasi Pendidikan Formal (%)	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	98,78	100,88	102,38	105,86	106,88
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	90	92,89	93,68	90,31	91,98
3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	59,9	63,61	67,09	62,67	72,24

Sumber: Laporan Eksekutif Pendidikan Jatim 2010-2014

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2014 sebesar 106,88%, artinya terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah. Hal ini terlihat dari angka APK SD lebih dari 100%. Untuk jenjang pendidikan SMP, APK sebesar 91,98 % pada tahun 2014, hal ini menunjukkan persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 91,98%. Untuk APK jenjang pendidikan SMA sebesar 72,24%, artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 72,24%.

4.1.2.2.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat waktu. APM adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah dengan seluruh penduduk menurut usia sekolah tertentu (BPS).

Tabel 4.6**APM Menurut Jenjang Pendidikan di Jawa Timur, Tahun 2010-2014**

No	Partisipasi Pendidikan Formal (%)	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	87,9	91,88	92,92	96,1	96,98
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	69,09	71,77	74,52	77,29	80,94
3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	48,1	49,32	52,12	53,05	60

Sumber: Laporan Eksekutif Pendidikan Jatim 2010-2014

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa APM SD-SMA di Jawa Timur secara umum mengalami peningkatan sejak tahun 2010-2014. Pada tahun 2014 APM SD sebesar 96,98%, yang berarti 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat sekitar 98 orang bersekolah di bangku SD. Untuk APM SMP sebesar 80,94%, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, terdapat sekitar 80 orang bersekolah di bangku SMP. APM SMA sebesar 60%, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk 16-18 tahun, terdapat sekitar 60 orang bersekolah di bangku SMA.

4.1.2.2.4. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat di lihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas. Level pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan antar wilayah.

Tabel 4.7
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun ke Atas di Jawa Timur,
Tahun 2010-2014

No	Partisipasi Pendidikan Formal (%)	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tidak/Belum Sekolah	10,91	8,81	8,12	7,63	7,61
2.	Tidak Tamat SD	13,96	20,18	19,99	20,53	20,18
3.	SD/Sederajat	30,95	30,56	30,11	29,87	29,15
4.	SMP/Sederajat	19,62	18,04	18,22	17,69	17,89
5.	SMA/Sederajat	13,7	12,26	13,07	13,71	13,86
6.	SMK/ sederajat	5,5	5,2	5,26	5,57	5,9
7.	Perguruan Tinggi	5,36	4,95	5,24	4,99	5,41
	TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Eksekutif Pendidikan Jatim 2010-2014

Secara umum penduduk di Jawa Timur masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal ini terlihat pada besarnya persentase penduduk yang berpendidikan SD. Namun demikian, persentase penduduk yang berpendidikan SD mengalami penurunan dari 30,95% pada tahun 2010 menjadi 30,56% pada tahun 2011, turun menjadi 30,11 di tahun 2012, turun menjadi 29,87 di tahun 2013 kemudian turun menjadi 29,15 di tahun 2014.

4.1.2.3. Kondisi Agama

Cakupan agama adalah jumlah sarana peribadatan, jumlah pernikahan, talak cerai dan rujuk, serta banyaknya Jamaah Haji. Agama yang dianut penduduk, meliputi agama Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Lainnya. Sarana peribadatan meliputi banyaknya Masjid, Gereja, Pura, dan Vihara. Untuk jumlah Jamaah Haji yang diberangkat dari Surabaya.

Tabel 4.8
Penduduk Menurut Agama di Jawa Timur Tahun 2010-2014

Agama dan Tahun	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu
2010	36.113.396	638.467	234.204	112.177	60.760	6.166
2011	36.675.900	688.123	345.908	188.435	88.907	6.234
2012	37.030.820	711.896	402.737	237.713	126.257	4.108
2013	38.210.555	890.512	431.764	301.980	157.209	7.600
2014	39.657.788	1.271.343	492.875	343.551	205.716	10.600

Sumber: BPS Jatim dan Indonesia.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Jawa Timur beragama Islam dengan jumlah 36.113.396 di tahun 2010, kemudian naik berturut-turut di tahun 2011 hingga 2014 dengan jumlah, 36.675.900, 37.030.820, 38.210.555, 39.657.788. Agama yang menjadi minoritas di provinsi Jawa Timur adalah Konghuchu yang berjumlah 6.166 di tahun 2010, 6.234 di tahun 2011, 4.108 di tahun 2012, 7.600 di tahun 2013 dan 10.600 di tahun 2014.

Tabel 4.9
Jumlah Jamaah Haji di Jawa Timur Tahun 2010-2014 yang Diberangkatkan dari Surabaya

Tahun	Jumlah Jamaah Haji
2010	34.013
2011	34.175
2012	33.576
2013	27.029
2014	27.241

Sumber: BPS Jatim

Berdasarkan dari tabel 4.9 di atas jumlah Jamaah Haji di Jawa Timur pada tahun 2010 hingga 2014 secara umum mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan kuota haji sementara karena perluasan kawasan Masjidil Haram, Mekkah Saudi Arabia.

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di Jawa Timur, Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk
2010	360.230
2011	393.731
2012	372.772
2013	166.040
2014	348.653

Sumber: BPS, Jatim

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk nikah, talak, cerai dan rujuk di Jawa Timur selama tahun 2010 hingga 2014 secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk nikah, talak, cerai dan rujuk yaitu 360.230, naik menjadi sebesar 393.731 di tahun 2011, kemudian turun di tahun 2012 dan 2013 menjadi sebesar 372.772 dan 166.040 lalu naik di tahun 2014 menjadi 348.653.

4.1.3. Kondisi Perumahan

Kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia adalah pangan, sandang, dan papan (perumahan). Fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga untuk tempat berlindung dan berkomunikasi dengan keluarga, serta sebagai tempat sosialisasi dengan lingkungan.

Tabel 4.11
Indikator Perumahan di Jawa Timur Tahun 2010-2014

No	Indikator (%)	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri	87,05	86,62	88,13	87,28	87,14
2.	Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kontra/Sewa	5,69	5,07	4,47	4,85	4,91

Sumber: Laporan Eksekutif Perumahan dan Konsumsi RT di Jatim 2010-2014

Tabel 4.11
Indikator Perumahan di Jawa Timur Thun 2010-2014

No	Indikator (%)	2010	2011	2012	2013	2014
3.	Rumah Tangga menurut Atap Terluas bukan Ijuk/Lainnya	87,99	94,7	95,09	96,82	96,28
4.	Rumah Tangga menurut Dinding Terluas bukan Bambu/lainnya	89,8	89,77	90,89	91,74	92,45
5.	Rumah Tangga menurut Lantai Terluas bukan Tanah	83,42	85,12	85,67	86,95	87,79
6.	Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak	73,85	74,78	75,13	75,22	75,64
7.	Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dari Listrik	0,88	0,89	0,91	0,93	0,92
8	Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dari Listrik PLN	97,09	98,32	98,5	98,77	98,77

Sumber: Laporan Eksekutif Perumahan dan Konsumsi RT di Jatim 2010-2014

Berdasarkan pada tabel 4.11 persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumah milik sendiri mengalami tren yang cenderung menurun dari tahun 2010-2014, namun mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi sebesar 88,13 dari tahun 2011 yang sebesar 86,62. Sementara itu, rumah tangga menurut sumber air minum layak persentasenya mengalami peningkatan tiap tahunnya pada tahun 2010-2014, yaitu sebesar 73,85; 74,78; 75,13; 75,22; 75,64.

4.1.4. Pengeluaran dan Konsumsi

Tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga dapat dicerminkan dengan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan konsumsi (BPS). Pengeluaran konsumsi setiap anggota rumah tangga di bagi menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan makanan. Besarnya pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi setiap rumah tangga pada dasarnya berbeda-beda. Secara umum semakin tinggi tingkat pendapat, maka pengeluaran konsumsi bukan makanan semakin besar , karena eluruh kebutuhan untuk konsumsi bukan

makanan cenderung lebih rendah karena kebutuhan untuk konsumsi makanan masih merupakan prioritas utama.

Semakin tinggi pendapatan cenderung akan menyebabkan terjadinya pergeseran pola konsumsi. Persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi makanan relatif akan menurun, sebaliknya persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi bukan makanan akan cenderung meningkat. Berdasarkan hal itu, dapat diindikasikan bahwa pola konsumsi suatu masyarakat dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 4.12
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Makanan dan Bukan Makanan di Jawa Timur Tahun 2010-2014

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran (Rp)					Persentase (%)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Makanan	223.534	242.829	259.402	296.364	333.945	54,78	50,64	49,48	50,54	49,5
Non Makanan	184.487	236.661	264.823	290.045	340.635	45,22	49,36	50,52	49,46	50,5
Jumlah	408.021	479.490	524.225	586.409	674.580	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Eksekutif Perumahan dan Konsumsi RT di Jatim 2010-2014

Berdasarkan pada tabel 4.12, dapat diketahui bahwa sebagian besar pengeluaran penduduk di Jawa Timur pada tahun 2010, 2011 dan 2013 digunakan untuk konsumsi makanan yaitu sebesar 50,78; 50,64; 50,54. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2014 sebagian besar pengeluaran penduduk di Jawa Timur digunakan untuk non makanan yaitu sebesar 50,52 dan 50,5.

4.2. Pencapaian Pembangunan Manusia di Jawa Timur

4.2.1. Hasil Perhitungan Pencapaian HDI

Tabel 4.13
Pencapaian HDI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014

NO	Kabupaten/Kota	2010	Kabupaten/Kota	2011	Kabupaten/Kota	2012	Kabupaten/Kota	2013	Kabupaten/Kota	2014
1	78. Kota Surabaya	77,2	78. Kota Surabaya	77,62	78. Kota Surabaya	78,05	78. Kota Surabaya	78,51	73. Kota Malang	78,96
2	73. Kota Malang	76,69	73. Kota Malang	77,36	73. Kota Malang	78,04	73. Kota Malang	78,44	78. Kota Surabaya	78,87
3	77. Kota Madiun	75,98	77. Kota Madiun	76,48	77. Kota Madiun	77,21	77. Kota Madiun	78,41	77. Kota Madiun	78,81
4	15. Sidoarjo	73,75	15. Sidoarjo	74,48	19. Madiun	76,32	15. Sidoarjo	76,39	15. Sidoarjo	76,78
5	76. Kota Mojokerto	72,78	76. Kota Mojokerto	73,47	15. Sidoarjo	75,14	76. Kota Mojokerto	74,91	72. Kota Blitar	75,26
6	72. Kota Blitar	72,56	72. Kota Blitar	73,08	76. Kota Mojokerto	74,2	72. Kota Blitar	74,53	76. Kota Mojokerto	75,04
7	71. Kota Kediri	72,2	71. Kota Kediri	72,93	71. Kota Kediri	73,66	71. Kota Kediri	74,18	71. Kota Kediri	74,62
8	25. Gresik	69,9	25. Gresik	71,11	72. Kota Blitar	73,53	75. Kota Pasuruan	72,89	75. Kota Pasuruan	73,23
9	75. Kota Pasuruan	69,69	75. Kota Pasuruan	70,41	25. Gresik	72,12	25. Gresik	72,47	25. Gresik	72,84
10	79. Kota Batu	68,66	79. Kota Batu	69,76	75. Kota Pasuruan	72,01	79. Kota Batu	71,55	79. Kota Batu	71,89
11	16. Mojokerto	68,14	16. Mojokerto	68,71	79. Kota Batu	70,62	74. Kota Probolinggo	70,05	74. Kota Probolinggo	70,49
12	20. Magetan	67,58	20. Magetan	68,52	20. Magetan	69,56	20. Magetan	69,86	20. Magetan	70,29
13	74. Kota Probolinggo	67,3	74. Kota Probolinggo	68,14	16. Mojokerto	69,17	16. Mojokerto	69,84	16. Mojokerto	70,22
14	04. Tulungagung	67,28	04. Tulungagung	67,76	74. Kota Probolinggo	68,93	04. Tulungagung	69,3	18. Nganjuk	69,59
15	06. Kediri	66,24	06. Kediri	66,84	04. Tulungagung	68,29	18. Nganjuk	68,98	04. Tulungagung	69,49
16	17. Jombang	66,2	17. Jombang	66,84	18. Nganjuk	68,07	24. Lamongan	68,9	24. Lamongan	69,42
17	18. Nganjuk	65,6	18. Nganjuk	66,58	17. Jombang	67,82	17. Jombang	68,63	17. Jombang	69,07
18	24. Lamongan	65,4	24. Lamongan	66,21	24. Lamongan	67,51	19. Madiun	68,07	19. Madiun	68,6
19	19. Madiun	64,87	19. Madiun	65,98	06. Kediri	67,29	06. Kediri	68,01	06. Kediri	68,44
20	05. Blitar	64,79	21. Ngawi	65,84	21. Ngawi	66,72	21. Ngawi	67,25	21. Ngawi	67,78
21	10. Banyuwangi	64,54	10. Banyuwangi	65,48	05. Blitar	66,17	02. Ponorogo	67,03	02. Ponorogo	67,4
22	21. Ngawi	64,52	05. Blitar	65,47	02. Ponorogo	66,16	10. Banyuwangi	66,74	10. Banyuwangi	67,31
23	02. Ponorogo	64,13	02. Ponorogo	65,28	10. Banyuwangi	66,12	05. Blitar	66,49	05. Blitar	66,88
24	03. Trenggalek	63,67	03. Trenggalek	64,27	03. Trenggalek	65,01	03. Trenggalek	65,76	03. Trenggalek	66,16
25	07. Malang	63,47	07. Malang	63,97	07. Malang	64,71	07. Malang	65,2	07. Malang	65,59
26	22. Bojonegoro	62,19	22. Bojonegoro	63,22	22. Bojonegoro	64,2	22. Bojonegoro	64,85	22. Bojonegoro	65,27
27	23. Tuban	61,33	23. Tuban	62,47	23. Tuban	63,36	23. Tuban	64,14	23. Tuban	64,58
28	01. Pacitan	61,14	01. Pacitan	62,03	01. Pacitan	62,94	14. Pasuruan	63,74	14. Pasuruan	64,35
29	14. Pasuruan	60,79	14. Pasuruan	61,43	14. Pasuruan	62,31	12. Situbondo	63,43	12. Situbondo	63,91
30	12. Situbondo	60,07	12. Situbondo	60,82	11. Bondowoso	62,24	01. Pacitan	63,38	01. Pacitan	63,81
31	09. Jember	59,94	08. Lumajang	60,72	12. Situbondo	62,23	11. Bondowoso	63,21	11. Bondowoso	63,43
32	13. Probolinggo	59,83	09. Jember	60,64	13. Probolinggo	61,33	13. Probolinggo	62,61	13. Probolinggo	63,04
33	08. Lumajang	59,62	11. Bondowoso	60,46	08. Lumajang	61,31	09. Jember	62,43	28. Pamekasan	62,66
34	11. Bondowoso	59,47	28. Pamekasan	60,42	09. Jember	61,31	28. Pamekasan	62,27	09. Jember	62,64
35	28. Pamekasan	59,37	13. Probolinggo	60,3	28. Pamekasan	61,21	08. Lumajang	61,87	08. Lumajang	62,33
36	29. Sumenep	57,27	29. Sumenep	58,7	29. Sumenep	60,08	29. Sumenep	60,84	29. Sumenep	61,43
37	26. Bangkalan	57,23	26. Bangkalan	58,63	26. Bangkalan	59,65	26. Bangkalan	60,19	26. Bangkalan	60,71
38	27. Sampang	54,49	27. Sampang	55,17	27. Sampang	55,78	27. Sampang	56,45	27. Sampang	56,98
	Jawa Timur	65,36		66,06		66,74		67,55		68,14

Sumber: Publikasi HDI 2010-2014 oleh BPS

Berdasarkan pada tabel 4.13, pertumbuhan HDI kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2010-2014. Rata-rata nilai HDI kota/kabupaten secara keseluruhan di Jawa Timur pada tahun 2010-2014 adalah sebesar 65,36; 66,06; 66,74; 67,55; 68,14. Angka tersebut menutupi variasi nilai HDI antar kabupaten/kota, padahal terdapat perbedaan pencapaian antara HDI tertinggi dengan HDI terendah sekitar 22,71 poin pada tahun 2010; 22,45 poin pada tahun 2011; 22,27 pada tahun 2012; 22,06 pada tahun 2013; dan 21,98 pada tahun 2014 dengan rentang nilai 77,22-54,49; 77,62-55,12; 78,05-55,78; 78,51-56,45; 78,96-56,98. Masing-masing untuk Kota Surabaya dengan nilai tertinggi dan Sampang untuk nilai terendah pada tahun 2010-2013, serta Kota Malang dengan nilai tertinggi dan Sampang untuk nilai terendah pada tahun 2014.

Secara berturut-turut pada tahun 2010-2013 Kota Surabaya tercatat sebagai daerah dengan pencapaian HDI tertinggi yaitu mencapai 77,2; 77,62; 78,05; 78,51, diikuti kemudian oleh Kota Malang sebagai urutan kedua yaitu sebesar 76,69; 77,36; 78,04; 78,44 dan Kota Madiun yang mencapai 75,98; 76,48; 77,21; 78,41. Sedangkan pada tahun 2014 Kota Malang berada pada peringkat tertinggi dengan nilai sebesar 78,96, diikuti Kota Surabaya dan Kota Madiun dengan nilai HDI sebesar 78,87 dan 78,81. Secara historis ketiga daerah tersebut selama tahun 2010-2014 menjadi daerah tiga terbaik dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Timur.

Kabupaten Sampang menjadi daerah dengan pencapaian HDI terendah selama lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2010-2014 dengan nilai mencapai

54,49; 55,17; 55,78; 56,45; 56,98, kemudian diikuti dengan dua kabupaten lainnya yang memiliki nilai HDI terendah secara berturut-turut adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep, yang mana dari ketiga daerah dengan pencapaian HDI terendah semuanya berada di Pulau Madura.

Berdasarkan skala internasional, pencapaian HDI dapat dikategorikan menjadi empat: kategori tinggi ($HDI > 80$), kategori menengah atas ($66 < HDI < 80$), kategori menengah bawah ($50 < HDI < 66$), dan kategori rendah ($HDI < 50$). Jika diukur menurut skala internasional, berdasarkan pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2010, 16 kabupaten/kota masuk dalam kategori menengah atas, 22 kabupaten/kota masuk dalam kategori menengah bawah. Pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 mengalami peningkatan status menjadi 18, 23, 23, 24 kabupaten/kota masuk dalam kategori HDI menengah atas dan 20, 15, 15, 14 masuk dalam kategori HDI menengah bawah. Data tersebut seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.14.

Tabel 4.14
Status HDI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014

Pencapaian HDI	Jumlah Kota/Kabupaten				
	2010	2011	2012	2013	2014
Tinggi ($HDI > 80$)	0	0	0	0	0
Menengah Atas ($66 < HDI < 80$)	16	18	23	23	24
Menengah Bawah ($50 < HDI < 66$)	22	20	15	15	14
Rendah ($HDI < 50$)	0	0	0	0	0

Sumber: Publikasi HDI 2010-2014 oleh BPS.

Berdasarkan pada tabel 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 dan 2011 daerah dengan kategori HDI menengah bawah lebih mendominasi yang berjumlah 22 dan 20, dibandingkan dengan daerah kategori HDI menengah atas yang berjumlah 16 dan 18, sedangkan pada tahun 2012-2014 daerah dengan kategori HDI menengah atas lebih banyak yang berjumlah 23 ditahun 2012-2013 dan 24 ditahun 2014, dibandingkan dengan daerah dengan kategori HDI menengah kebawah.

4.2.2. Hasil Perhitungan Pencapaian I-HDI

Tabel 4.15
Pencapaian I-HDI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014

NO	Kabupaten/Kota	2010	Kabupaten/Kota	2011	Kabupaten/Kota	2012	Kabupaten/Kota	2013	Kabupaten/Kota	2014
1	07. Malang	90,06358997	15. Sidoarjo	82,42788166	15. Sidoarjo	85,90383083	78. Kota Surabaya	82,79493264	09. Jember	91,35747549
2	17. Jombang	81,53754173	24. Lamongan	80,54463849	07. Malang	84,39020531	15. Sidoarjo	78,97897186	07. Malang	82,17858838
3	24. Lamongan	78,80142867	07. Malang	80,48514796	24. Lamongan	82,23769018	07. Malang	71,89409137	24. Lamongan	81,20726698
4	25. Gresik	78,76235478	25. Gresik	80,32768868	25. Gresik	81,56268064	25. Gresik	71,42305588	17. Jombang	79,8032667
5	09. Jember	77,55622559	17. Jombang	77,5678576	17. Jombang	79,04576973	10. Banyuwangi	71,21885711	14. Pasuruan	79,73055051
6	06. Kediri	76,43165829	10. Banyuwangi	74,64933008	06. Kediri	73,91980507	16. Mojokerto	70,452844	15. Sidoarjo	79,55771339
7	15. Sidoarjo	76,41507847	16. Mojokerto	72,62147475	16. Mojokerto	73,87506926	24. Lamongan	70,0042099	25. Gresik	78,69225435
8	05. Blitar	71,31677115	29. Sumenep	72,10698742	09. Jember	72,85939463	17. Jombang	68,60388432	29. Sumenep	76,97665621
9	16. Mojokerto	70,9503724	06. Kediri	71,82413758	10. Banyuwangi	72,32358639	06. Kediri	67,46660617	27. Sampang	76,0532361
10	29. Sumenep	70,91338234	77. Kota Madiun	70,70986856	29. Sumenep	71,49951887	05. Blitar	64,52013239	16. Mojokerto	75,86779509
11	28. Pamekasan	69,68416288	23. Tuban	68,67019596	14. Pasuruan	71,33221343	14. Pasuruan	63,44760173	10. Banyuwangi	75,63637388
12	10. Banyuwangi	69,00637107	05. Blitar	68,58617483	05. Blitar	70,40327834	04. Tulungagung	63,006619	13. Probolinggo	73,14199606
13	14. Pasuruan	68,63535148	14. Pasuruan	68,34385264	22. Bojonegoro	69,28859841	79. Kota Batu	62,90701173	22. Bojonegoro	72,07089075
14	02. Ponorogo	68,2086743	22. Bojonegoro	67,94661476	78. Kota Surabaya	69,20102304	76. Kota Mojokerto	62,20061905	28. Pamekasan	72,04261225
15	03. Trenggalek	67,72113878	27. Sampang	67,50617896	23. Tuban	68,61941215	77. Kota Madiun	61,78674864	06. Kediri	71,7192598
16	22. Bojonegoro	67,61464655	09. Jember	66,0886976	28. Pamekasan	68,47437336	09. Jember	61,73006837	23. Tuban	70,5371125
17	08. Lumajang	67,5653675	04. Tulungagung	64,96392734	27. Sampang	67,13775894	71. Kota Kediri	61,32349436	05. Blitar	70,47766233
18	13. Probolinggo	67,54505875	28. Pamekasan	64,58834564	04. Tulungagung	66,76112409	22. Bojonegoro	60,99035253	26. Bangkalan	68,30696278
19	23. Tuban	67,38435393	08. Lumajang	63,88564845	08. Lumajang	64,04487324	23. Tuban	60,85001691	08. Lumajang	67,65246103
20	04. Tulungagung	66,84329123	18. Nganjuk	63,82009951	18. Nganjuk	63,04362691	08. Lumajang	60,50619857	18. Nganjuk	65,47600482
21	27. Sampang	66,14871487	78. Kota Surabaya	63,03028373	13. Probolinggo	63,04337133	74. Kota Probolinggo	60,46619244	04. Tulungagung	65,19776317
22	01. Pacitan	64,64850672	02. Ponorogo	62,4751412	77. Kota Madiun	62,98623019	20. Magetan	60,25419846	79. Kota Batu	64,58425978
23	21. Ngawi	64,49521527	76. Kota Mojokerto	62,1172548	02. Ponorogo	62,77036315	75. Kota Pasuruan	59,99535707	19. Madiun	64,33726134
24	18. Nganjuk	62,28192394	13. Probolinggo	61,81991848	71. Kota Kediri	62,76231246	18. Nganjuk	59,91636978	71. Kota Kediri	64,23568011
25	26. Bangkalan	59,5971786	75. Kota Pasuruan	60,74750734	76. Kota Mojokerto	62,51057657	72. Kota Blitar	59,49972176	20. Magetan	63,58696283
26	20. Magetan	57,84722683	79. Kota Batu	60,25206284	72. Kota Blitar	61,60384263	19. Madiun	59,42182235	77. Kota Madiun	63,30556651

Sumber: Hasil perhitungan I-HDI

Tabel 4.15
Pencapaian I-HDI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-
2014

NO	Kabupaten/Kota	2010	Kabupaten/Kota	2011	Kabupaten/Kota	2012	Kabupaten/Kota	2013	Kabupaten/Kota	2014
27	76. Kota Mojokerto	55,84394979	72. Kota Blitar	59,87856593	75. Kota Pasuruan	61,56833506	03. Trenggalek	58,94145355	74. Kota Probolinggo	62,70466531
28	78. Kota Surabaya	55,50790161	20. Magetan	59,25308707	20. Magetan	61,19406916	02. Ponorogo	58,56829855	02. Ponorogo	62,62976309
29	71. Kota Kediri	55,26027518	19. Madiun	59,23065032	03. Trenggalek	60,66516313	21. Ngawi	57,47543143	72. Kota Blitar	61,87258038
30	12. Situbondo	54,35376755	21. Ngawi	59,13913291	21. Ngawi	59,89925177	27. Sampang	56,52024906	76. Kota Mojokerto	61,85863711
31	19. Madiun	54,15491492	26. Bangkalan	58,89416804	19. Madiun	59,85280893	29. Sumenep	56,32914537	11. Bondowoso	61,57952087
32	72. Kota Blitar	54,12390889	71. Kota Kediri	58,2747652	74. Kota Probolinggo	59,71312672	28. Pamekasan	55,56784366	75. Kota Pasuruan	61,35882924
33	11. Bondowoso	52,87381232	03. Trenggalek	57,74401142	79. Kota Batu	58,94632485	01. Pacitan	55,29867992	21. Ngawi	60,89909929
34	79. Kota Batu	51,40824758	73. Kota Malang	56,78257189	26. Bangkalan	58,58289095	73. Kota Malang	55,00260087	03. Trenggalek	60,39348042
35	73. Kota Malang	51,22394063	12. Situbondo	56,10156023	01. Pacitan	57,69458969	13. Probolinggo	54,56848886	12. Situbondo	58,66466347
36	77. Kota Madiun	51,02686573	01. Pacitan	55,70569264	11. Bondowoso	54,63292579	26. Bangkalan	54,30061848	01. Pacitan	57,29692404
37	75. Kota Pasuruan	49,08695655	74. Kota Probolinggo	54,8777653	12. Situbondo	52,99109075	11. Bondowoso	50,58636006	73. Kota Malang	55,43635627
38	74. Kota Probolinggo	48,3984401	11. Bondowoso	52,70207625	73. Kota Malang	52,42248492	12. Situbondo	49,56855924	78. Kota Surabaya	54,16620189
	Jawa Timur	64,76943597		65,43923619		66,57272608		62,06283441		68,75248301

Sumber: Hasil perhitungan I-HDI

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa sebaran nilai I-HDI kabupaten/kota di Jawa Timur lebih variatif dan fluktuatif dibanding sebaran nilai HDI, sehingga berpengaruh terhadap peringkat tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Selisih antara peringkat I-HDI tertinggi dengan peringkat I-HDI terendah sekitar 41,66 poin di tahun 2010, 22,72 poin di tahun 2011, 33,48 poin di tahun 2012, 33,22 poin di tahun 2013, 37,19 poin di tahun 2014. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan terhadap jarak antara peringkat tertinggi dan peringkat terendah dari hasil perhitungan HDI yang berkisar pada 22 poin saja.

Nilai tertinggi di tahun 2010 dicapai oleh Kabupaten Malang dengan nilai sebesar 90,06, kemudian di tahun 2011 hingga 2012 nilai tertinggi di capai oleh Kabupaten Sidoarjo dengan nilai sebesar 82,42 dan 85,90. Nilai tertinggi di tahun

2013 dicapai oleh Kota Surabaya dengan nilai 82,79, di tahun 2014 nilai tertinggi di capai oleh Kabupaten Jember dengan nilai sebesar 91,35. Sementara itu, Kota Surabaya yang notabene merupakan ibukota Jawa Timur pada tahun 2010 berada pada peringkat 28 dengan nilai sebesar 55,50, naik menjadi peringkat 21 di tahun 2011 dengan nilai sebesar 63,03, di tahun 2012 naik lagi menjadi peringkat 14 dengan nilai sebesar 69,20, di tahun naik lagi menjadi peringkat pertama dengan nilai 82,79, lalu turun dengan drastis menjadi peringkat terakhir dengan nilai sebesar 54,16. Hal ini disebabkan dengan banyaknya komponen dan indikator dalam perhitungan pencapaian I-HDI yang mana berpengaruh terhadap porsi nilai yang dihasilkan.

Berdasarkan skala internasional, pencapaian I-HDI juga dapat dikategorikan menjadi empat: kategori tinggi ($HDI > 80$), kategori menengah atas ($66 < HDI < 80$), kategori menengah bawah ($50 < HDI < 66$), dan kategori rendah ($HDI < 50$). Jika diukur menurut skala internasional, maka pada tahun 2010 dua kabupaten/kota masuk dalam kategori tinggi, 19 kabupaten/kota masuk dalam kategori menengah atas, 15 kabupaten/kota masuk kategori menengah bawah, dua kabupaten kota masuk dalam kategori rendah. Sedangkan pada tahun 2014 tiga kabupaten/kota masuk kategori tinggi, 16 kabupaten/kota masuk kategori menengah atas, dan 19 kabupaten/kota masuk kategori menengah bawah.

Tabel 4.16
Status I-HDI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014

Pencapaian I-HDI	Jumlah Kota/Kabupaten				
	2010	2011	2012	2013	2014
Tinggi (I-HDI > 80)	2	4	4	1	3

Sumber: Hasil perhitungan I-HDI

Tabel 4.16
Status I-HDI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014

Pencapaian I-HDI	Jumlah Kota/Kabupaten				
	2010	2011	2012	2013	2014
Menengah Atas ($66 < I\text{-HDI} < 80$)	19	12	14	8	16
Menengah Bawah ($50 < I\text{-HDI} < 66$)	15	22	20	28	19
Rendah ($I\text{-HDI} < 50$)	2	0	0	1	0

Sumber: Hasil perhitungan I-HDI

Berdasarkan pada tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status pembangunan menengah bawah yang mana berbeda dengan hasil HDI yang sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur berstatus pembangunan menengah atas. Adapun yang lima kabupaten kota yang selalu berda pada ketegori ini selama tahun 2010-2014 secara berturut-turut adalah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngajuk, Kabupaten Magetan dan Kota Malang.

4.2.3. Pencapaian *Material* dan *Non-Material welfare* di Jawa Timur

Melihat keberhasilan pencapaian pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan I-HDI, melainkan dengan melihat aspek materi dan non-materi, yang mana aspek materi diukur menggunakan *index ad-Maal* yang indikatornya adalah 1) pengeluaran perkapita yang disesuaikan, 2) kedalaman kemiskinan, 3) indeks gini. Sedangkan untuk aspek non-materi yang diukur menggunakan empat indeks yaitu 1) *index ad-Dien* yang indikatornya adalah angka kriminalitas dan angka partisipasi siswa sekolah agama, 2) *index an-Nafs* yang indikatornya adalah angka harapan hidup, 3) *index al-Aql* yang indikatornya adalah angka

melek huruf dan rata-rata lama sekolah, 4) *index an-Nasl* yang indikatornya adalah angka kematian bayi dan jumlah kelahiran total. Berikut ini merupakan tabel pencapaian pembangunan berdasarkan *material walfare* di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 4.17
Status Komponen I-HDI Berdasarkan *Material Welfare* Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014

NO	Kabupaten/Kota	2010	Kabupaten/Kota	2011	Kabupaten/Kota	2012	Kabupaten/Kota	2013	Kabupaten/Kota	2014
1	77. Kota Madiun	0,751217249	15. Sidoarjo	0,839854304	15. Sidoarjo	0,897058824	79. Batu	0,896711	79. Batu	0,90625
2	73. Malang	0,741613362	77. Kota Madiun	0,810039075	76. Kota Mojokerto	0,847539708	76. Kota Mojokerto	0,890479	16. Mojokerto	0,876488095
3	15. Sidoarjo	0,721085665	73. Malang	0,796569426	78. Surabaya	0,811887255	15. Sidoarjo	0,883355	15. Sidoarjo	0,860119048
4	78. Surabaya	0,716950959	76. Kota Mojokerto	0,77567252	71. Kediri	0,778593851	75. Pasuruan	0,830605	76. Kota Mojokerto	0,851190476
5	25. Gresik	0,63012592	75. Pasuruan	0,763567471	75. Pasuruan	0,772318678	73. Malang	0,8125	71. Kediri	0,833333333
6	16. Mojokerto	0,60850239	78. Surabaya	0,759330183	72. Blitar	0,758756376	78. Surabaya	0,812047	75. Pasuruan	0,810267857
7	75. Pasuruan	0,581064242	79. Batu	0,681132878	79. Batu	0,758523825	16. Mojokerto	0,786345	77. Kota Madiun	0,805059524
8	71. Kediri	0,551727919	72. Blitar	0,66278884	77. Kota Madiun	0,741006575	74. Probolinggo	0,776231	74. Probolinggo	0,79985119
9	17. Jombang	0,550951388	16. Mojokerto	0,606181159	73. Malang	0,731004902	72. Blitar	0,755117	72. Blitar	0,779761905
10	76. Kota Mojokerto	0,549864478	71. Kediri	0,545173048	16. Mojokerto	0,681679356	71. Kediri	0,745598	25. Gresik	0,772321429
11	72. Blitar	0,545519963	25. Gresik	0,501625093	25. Gresik	0,664252064	77. Kota Madiun	0,726036	73. Malang	0,761904762
12	79. Batu	0,505768405	74. Probolinggo	0,493579884	74. Probolinggo	0,637187985	25. Gresik	0,685779	17. Jombang	0,727829297
13	10. Banyuwangi	0,482561345	24. Lamongan	0,490077159	10. Banyuwangi	0,576766111	24. Lamongan	0,669949	10. Banyuwangi	0,723948081
14	24. Lamongan	0,467892611	10. Banyuwangi	0,477959209	24. Lamongan	0,568669353	10. Banyuwangi	0,666312	78. Surabaya	0,718005952
15	74. Probolinggo	0,457422619	20. Magetan	0,466206093	20. Magetan	0,556370497	17. Jombang	0,594751	24. Lamongan	0,714394471
16	18. Nganjuk	0,437684737	19. Madiun	0,455768426	17. Jombang	0,538914167	20. Magetan	0,594169	19. Madiun	0,671246129
17	19. Madiun	0,433371684	12. Situbondo	0,443613123	04. Tulungagung	0,535314556	19. Madiun	0,57167	05. Blitar	0,667512093
18	04. Tulungagung	0,432322519	08. Lumajang	0,440332437	07. Malang	0,53185367	04. Tulungagung	0,56335	20. Magetan	0,654414076
19	11. Bondowoso	0,40565032	04. Tulungagung	0,437698651	05. Blitar	0,508205418	05. Blitar	0,526229	04. Tulungagung	0,624286519
20	21. Ngawi	0,393528254	14. Pasuruan	0,431801707	19. Madiun	0,499927323	09. Jember	0,520141	23. Tuban	0,592815748
21	08. Lumajang	0,390430105	23. Tuban	0,419810746	06. Kediri	0,475879228	14. Pasuruan	0,515311	14. Pasuruan	0,565841651
22	05. Blitar	0,389847939	17. Jombang	0,419533439	14. Pasuruan	0,462713849	06. Kediri	0,502031	07. Malang	0,563392857
23	06. Kediri	0,3875876	07. Malang	0,416506533	12. Situbondo	0,454066055	08. Lumajang	0,494513	09. Jember	0,554371244
24	02. Ponorogo	0,367235252	18. Nganjuk	0,416149228	18. Nganjuk	0,448950324	07. Malang	0,486305	18. Nganjuk	0,537001637
25	14. Pasuruan	0,366535126	02. Ponorogo	0,403252838	23. Tuban	0,443369964	18. Nganjuk	0,481795	08. Lumajang	0,514333146
26	09. Jember	0,364036958	05. Blitar	0,399175147	02. Ponorogo	0,442481582	03. Trenggalek	0,473768	22. Bojonegoro	0,511820631
27	07. Malang	0,353898844	06. Kediri	0,376323858	09. Jember	0,440461141	23. Tuban	0,468032	06. Kediri	0,494759375
28	20. Magetan	0,334450608	22. Bojonegoro	0,368898867	11. Bondowoso	0,435484688	21. Ngawi	0,462501	03. Trenggalek	0,490674252
29	12. Situbondo	0,312189055	11. Bondowoso	0,36753329	21. Ngawi	0,430936328	12. Situbondo	0,458958	28. Pamekasan	0,480063932

Sumber: Hasil perhitungan MWI

Tabel 4.17
Status Komponen I-HDI Berdasarkan *Material Welfare* Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014

30	23. Tuban	0,288877043	21. Ngawi	0,36092014	08. Lumajang	0,424442493	02. Ponorogo	0,452781	02. Ponorogo	0,465184991
31	03. Trenggalek	0,268585643	09. Jember	0,357791929	22. Bojonegoro	0,424229827	22. Bojonegoro	0,452647	21. Ngawi	0,456298677
32	28. Pamekasan	0,254619758	29. Sumenep	0,352061604	28. Pamekasan	0,401348039	11. Bondowoso	0,424669	11. Bondowoso	0,45475146
33	01. Pacitan	0,243532338	28. Pamekasan	0,289398631	03. Trenggalek	0,399252711	13. Probolinggo	0,384283	12. Situbondo	0,437506707
34	13. Probolinggo	0,240369581	13. Probolinggo	0,287374187	01. Pacitan	0,371114494	01. Pacitan	0,360473	27. Sampang	0,404098251
35	22. Bojonegoro	0,235678749	03. Trenggalek	0,271517299	13. Probolinggo	0,346672317	28. Pamekasan	0,35227	01. Pacitan	0,398365107
36	27. Sampang	0,203731343	01. Pacitan	0,265476776	29. Sumenep	0,28370098	26. Bangkalan	0,289308	29. Sumenep	0,38323665
37	29. Sumenep	0,182515991	27. Sampang	0,25	26. Bangkalan	0,280392709	27. Sampang	0,275852	13. Probolinggo	0,373181419
38	26. Bangkalan	0,116666667	26. Bangkalan	0,238754889	27. Sampang	0,239583333	29. Sumenep	0,232843	26. Bangkalan	0,371209813
	Jawa Timur	0,42804249		0,47735395		0,542129225		0,575677		0,621239257

Sumber: Hasil perhitungan MWI

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, Kota Madiun berada pada peringkat pertama dalam perhitungan *material welfare* dengan nilai sebesar 0,751217. Namun, pada tahun 2011-2012, Sidoarjo berturut-turut berada pada peringkat pertama, dengan nilai sebesar 0,839 dan 0,897. Sedangkan pada tahun 2013-2014 Batu berturut-turut berada pada peringkat pertama dengan nilai sebesar 0,8967 dan 0,9062. Sementara itu Sumenep dan Bangkalan berada pada peringkat terendah.

Tabel 4.18
Status Komponen I-HDI Berdasarkan Non-Materi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014

NO	Kabupaten/Kota	2010	Kabupaten/Kota	2011	Kabupaten/Kota	2012	Kabupaten/Kota	2013	Kabupaten/Kota	2014
1	07. Malang	0,734370624	07. Malang	0,721117885	07. Malang	0,727934025	78. Kota Surabaya	0,706925	09. Jember	0,781067
2	15. Sidoarjo	0,673849238	15. Sidoarjo	0,659453859	15. Sidoarjo	0,680824987	07. Malang	0,665971	07. Malang	0,683369
3	25. Gresik	0,660983687	25. Gresik	0,655575539	25. Gresik	0,649675979	15. Sidoarjo	0,654405	14. Pasuruan	0,665377
4	17. Jombang	0,660549096	17. Jombang	0,648362833	24. Lamongan	0,642933052	06. Kediri	0,58665	29. Sumenep	0,63718
5	24. Lamongan	0,647319215	24. Lamongan	0,643892199	17. Jombang	0,640513539	25. Gresik	0,577888	13. Probolinggo	0,63099
6	06. Kediri	0,642148668	06. Kediri	0,631447068	06. Kediri	0,630807679	10. Banyuwangi	0,571227	27. Sampang	0,629945
7	09. Jember	0,636691207	10. Banyuwangi	0,615456143	78. Kota Surabaya	0,625596182	17. Jombang	0,566604	24. Lamongan	0,616824
8	78. Kota Surabaya	0,612051479	78. Kota Surabaya	0,589664707	09. Jember	0,604639031	24. Lamongan	0,553565	15. Sidoarjo	0,60472
9	10. Banyuwangi	0,595812238	05. Blitar	0,588524114	10. Banyuwangi	0,586287876	16. Mojokerto	0,545977	17. Jombang	0,602254
10	16. Mojokerto	0,594097562	16. Mojokerto	0,58330738	05. Blitar	0,583882951	05. Blitar	0,542578	26. Bangkalan	0,598002
11	05. Blitar	0,588071538	29. Sumenep	0,578055416	16. Mojokerto	0,580179625	14. Pasuruan	0,530421	06. Kediri	0,588863
12	29. Sumenep	0,581996816	09. Jember	0,575671309	14. Pasuruan	0,575835796	04. Tulungagung	0,526678	22. Bojonegoro	0,587879
13	22. Bojonegoro	0,578613552	23. Tuban	0,572003343	29. Sumenep	0,575299706	09. Jember	0,523813	10. Banyuwangi	0,585602
14	23. Tuban	0,572031497	22. Bojonegoro	0,571753213	22. Bojonegoro	0,570557928	22. Bojonegoro	0,514558	25. Gresik	0,584165
15	14. Pasuruan	0,569575478	14. Pasuruan	0,567762509	23. Tuban	0,56136378	23. Tuban	0,512342	28. Pamekasan	0,581098
16	04. Tulungagung	0,55285273	04. Tulungagung	0,554183709	04. Tulungagung	0,554359762	18. Nganjuk	0,506795	23. Tuban	0,558239

Sumber: Hasil perhitungan NWI

17	18. Nganjuk	0,54616584	27. Sampang	0,552705875	27. Sampang	0,552604357	08. Lumajang	0,499887	16. Mojokerto	0,54912
18	27. Sampang	0,541887614	18. Nganjuk	0,550629414	18. Nganjuk	0,536119913	02. Ponorogo	0,494846	08. Lumajang	0,548606
19	28. Pamekasan	0,534252613	08. Lumajang	0,528487964	28. Pamekasan	0,532469646	29. Sumenep	0,494748	05. Blitar	0,542782
20	08. Lumajang	0,528849701	28. Pamekasan	0,526583288	08. Lumajang	0,531647183	03. Trenggalek	0,493889	18. Nganjuk	0,530668
21	02. Ponorogo	0,521490306	02. Ponorogo	0,526306251	02. Ponorogo	0,52326826	21. Ngawi	0,484006	02. Ponorogo	0,512646
22	03. Trenggalek	0,515637603	77. Kota Madiun	0,521834168	03. Trenggalek	0,515896554	20. Magetan	0,481801	04. Tulungagung	0,512628
23	21. Ngawi	0,513322723	26. Bangkalan	0,513811448	26. Bangkalan	0,510890793	27. Sampang	0,480379	11. Bondowoso	0,511264
24	26. Bangkalan	0,511208753	03. Trenggalek	0,511218402	21. Ngawi	0,505934061	26. Bangkalan	0,478404	21. Ngawi	0,501096
25	13. Probolinggo	0,507332642	13. Probolinggo	0,509668218	13. Probolinggo	0,501060235	19. Madiun	0,473537	12. Situbondo	0,495795
26	20. Magetan	0,493961154	21. Ngawi	0,509052087	20. Magetan	0,492214411	77. Kota Madiun	0,473207	19. Madiun	0,493135
27	01. Pacitan	0,489098195	20. Magetan	0,489845528	01. Pacitan	0,486724685	01. Pacitan	0,471225	03. Trenggalek	0,490242
28	19. Madiun	0,48090222	01. Pacitan	0,48839222	19. Madiun	0,478478514	28. Pamekasan	0,466182	20. Magetan	0,488501
29	73. Kota Malang	0,470172336	19. Madiun	0,485250615	77. Kota Madiun	0,475970305	71. Kota Kediri	0,465207	01. Pacitan	0,475884
30	71. Kota Kediri	0,465912763	71. Kota Kediri	0,466170994	71. Kota Kediri	0,467413197	13. Probolinggo	0,452234	78. Kota Surabaya	0,475194
31	77. Kota Madiun	0,45593621	79. Kota Batu	0,456131913	72. Kota Blitar	0,454820175	79. Kota Batu	0,442995	71. Kota Kediri	0,467992
32	79. Kota Batu	0,452708053	72. Kota Blitar	0,454528559	79. Kota Batu	0,452203739	73. Kota Malang	0,440837	77. Kota Madiun	0,466398
33	72. Kota Blitar	0,45051772	76. Kota Mojokerto	0,453222873	74. Kota Probolinggo	0,450209347	72. Kota Blitar	0,440516	79. Kota Batu	0,456823
34	76. Kota Mojokerto	0,447683703	73. Kota Malang	0,449639547	76. Kota Mojokerto	0,446789751	76. Kota Mojokerto	0,43983	72. Kota Blitar	0,453886
35	74. Kota Probolinggo	0,445794801	12. Situbondo	0,446601204	75. Kota Pasuruan	0,445368377	74. Kota Probolinggo	0,439374	74. Kota Probolinggo	0,452779
36	75. Kota Pasuruan	0,444247059	75. Kota Pasuruan	0,444378358	73. Kota Malang	0,434686692	75. Kota Pasuruan	0,431855	75. Kota Pasuruan	0,447903
37	12. Situbondo	0,436736513	74. Kota Probolinggo	0,437569839	11. Bondowoso	0,433000924	11. Bondowoso	0,414754	76. Kota Mojokerto	0,444718
38	11. Bondowoso	0,429893209	11. Bondowoso	0,432977732	12. Situbondo	0,430909179	12. Situbondo	0,403601	73. Kota Malang	0,430786
	Jawa Timur	0,541703325		0,539769414		0,538141374		0,506571		0,544327

Sumber: Hasil perhitungan NWI

Berdasarkan pada tabel 4.18 di atas merupakan pencapaian pembangunan yang diukur berdasarkan kesejahteraan non-materi, dari jumlah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada tahun 2010, 2011, 2012, berturut-turut Kabupaten Malang berada pada peringkat pertama dengan nilai 0,734370624, 0,721117885, 0,727934025, Pada Tahun 2013 Kota Surabaya berada di peringkat pertama dengan nilai sebesar 0,706925 dan di tahun 2014 Kabupaten Jember berada di peringkat pertama dengan nilai sebesar 0,781067. Sementara untuk peringkat terendah pada tahun 2010 dan 2011 adalah Kabupaten Bondowoso dengan nilai sebesar 0,429893209 dan 0,432977732, pada tahun 2012 dan 2013 yaitu

Kabupaten Situbondo dengan nilai sebesar 0,430909179 dan 0,403601, lalu pada tahun 2014 yaitu Kota Malang dengan nilai sebesar 0,544327.

Bedasarkan hasil perhitungan pencapaian pembangunan dalam kesejahteraan materi dan non-materi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2010-2014, menunjukkan bahwa angka pencapain pembangunan berdasarkan pengukuran materi lebih besar tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan non materi yang cenderung menurun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah dalam mencapai pembangunan manusia masih hanya terfokus pada aspek materi saja, sedangkan pada aspek non-materi belum mendapatkan perhatian yang serius misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis Pencapaian I-HDI di Jawa Timur

Analisis mengenai perkembangan pencapaian pembangunan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang berdasarkan pada hasil perhitungan I-HDI yang disajikan peneliti pada sub bab 4.2, yang mana dapat diketahui bahwa pencapaian pembangunan dari tiap-tiap kabupaten/kota sangat beragam. Berikut ini merupakan penjelasan analisisnya.

1. Kabupaten/kota dengan status I-HDI tinggi ($I-HDI > 80$)

Selama tahun 2010 hingga 2014 terdapat dua kabupaten/kota di Jawa Timur yang masuk dalam kategori status pembangunan tinggi di tahun 2010, naik menjadi empat di tahun 2011 dan 2012, turun menjadi satu di tahun 2013,

kemudian naik lagi menjadi tiga. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perhitungan HDI yang sama sekali tidak ada kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada pada kategori ini. Kabupaten Malang pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2014 selalu masuk dalam kategori status pembangunan tinggi. Sedangkan pada tahun 2013 Kota Surabaya menjadi satu-satunya daerah yang masuk dalam kategori ini.

Dilihat dari komponen I-HDI pada Kabupaten Malang, pada dimensi *ad-Dien*, *an-Nasl* dan *al-Maal* Kabupaten Malang menunjukkan angka yang tinggi. Padahal dari hasil perhitungan HDI Kabupaten Malang hanya berada pada peringkat 25 selama tahun 2010-2014. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran I-HDI terhadap pencapaian pembangunan manusia lebih komprehensif dibanding dengan HDI, karena varian indikator yang lebih banyak sesuai dengan dimensi lima kebutuhan dasar *maqashid syariah*.

2. Kabupaten/kota dengan status I-HDI menengah atas ($66 < \text{I-HDI} < 80$)

Berdasarkan perhitungan I-HDI pada tahun 2010 terdapat 19 kota/kabupaten di Jawa Timur dengan status I-HDI menengah atas kemudian di tahun 2011 turun menjadi 12, naik di tahun 2012 menjadi 14, kemudian tahun 2013 turun lagi menjadi delapan, kemudian di tahun 2014 naik lagi menjadi 16. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap perhitungan HDI yang mana menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori menengah atas.

Sidoarjo yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang selalu berada kategori status I-HDI menengah atas selama tahun 2010 hingga 2014, jika dilihat dari indikator pembentuk I-HDI, berdasarkan pada angka harapan hidup selama tahun 2010 hingga 2014 secara berturut-turut berada pada peringkat ke tiga dengan usia harapan hidup rata-rata 73 tahun. Sementara itu berdasarkan pada indikator pendidikan, rasio angka melek huruf di Kabupaten Sidoarjo berada pada peringkat 24 pada tahun 2010, naik menjadi peringkat empat di tahun 2011, kemudian turun menjadi peringkat lima pada tahun 2012, naik lagi pada tahun 2013 menjadi peringkat empat, dan pada tahun 2014 turun menjadi peringkat delapan namun angka rasionya mengalami peningkatan, dengan persentase rata-rata 97%. Untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo berada pada peringkat enam pada tahun 2010 dan 2011 secara berturut-turut, kemudian mengalami peningkatan secara terus menerus pada tahun 2012 hingga 2014, menjadi berada pada peringkat empat di tahun 2012, peringkat di tahun 2013 dan peringkat dua di tahun 2014, dengan rata-rata 9,7 tahun. Angka tersebut cukup relevan mengingat di Kabupaten Sidoarjo sudah banyak tersedia fasilitas pendidikan mulai dari yang mewah hingga sederhana, serta dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo cukup baik, dilihat dari perkembangan UKM di Sidoarjo yang meningkat.

3. Kabupaten/kota dengan status I-HDI menengah bawah ($50 < \text{I-HDI} < 66$)

Berdasarkan hasil perhitungan I-HDI di Jawa Timur selama periode 2010 hingga 2014, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status pembangunan menengah ke bawah. Pada tahun 2010 terdapat 15

kabupaten/kota di Jawa Timur yang masuk dalam status pembangunan menengah ke bawah, naik menjadi 22 di tahun 2011, turun di tahun 2012 menjadi 20, naik lagi di tahun 28 di tahun 2013 lalu turun lagi di tahun 2014 menjadi 19. Hasil perhitungan ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan hasil perhitungan HDI yang mana menunjukkan sebagian besar dari kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status menengah atas. Adapun lima kabupaten/kota yang selalu berada dalam kategori ini selama tahun 2010-2014 adalah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan dan Kota Malang.

Adanya perbedaan hasil perhitungan HDI dan I-HDI tersebut tak lepas dari penambahan dimensi dan indikator-indikator yang digunakan dalam proses perhitungan. Seperti diketahui, dalam perhitungan HDI menggunakan pendekatan tiga dimensi yaitu, pendidikan, kesehatan dan pendapatan, dengan empat indikator yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Sedangkan, dalam perhitungan I-HDI menggunakan pendekatan lima dimensi yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang terdiri dari 10 indikator, yaitu angka kriminalitas, angka partisipasi siswa sekolah agama, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka kelahiran total, angka kematian bayi, pengeluaran perkapita, indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan. Sehingga, dengan menggunakan pendekatan lima dimensi pemeliharaan dalam kebutuhan dasar dan 10 indikator yang mencerminkan dari kelima dimensi tersebut, membuat pengukuran I-HDI lebih komprehensif dalam mengukur pembangunan manusia di dalam suatu

daerah, karena kelima dimensi tersebut merupakan gambaran kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.

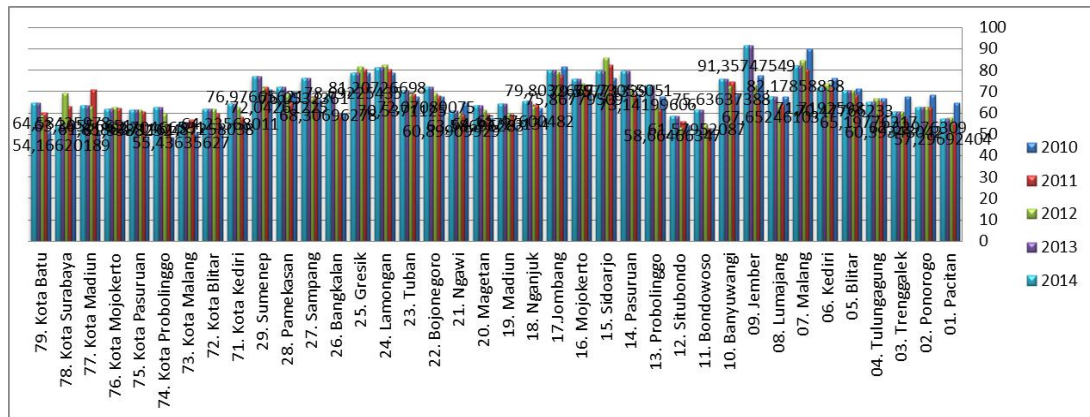
4. Kabupaten/kota dengan status I-HDI rendah ($I-HDI < 50$)

Pada tahun 2010 jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori status pembangunan rendah berjumlah dua yaitu Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo, untuk tahun 2013 hanya berjumlah satu kabupaten yaitu Situbondo.

Kota Pasuruan merupakan kota dengan indikator pendidikan yaitu angka melek huruf juga rata-rata lama sekolah yang berada pada peringkat 9 teratas, masuk ke dalam salah satu provinsi dengan kategori status pembangunan rendah, padahal pada perhitungan HDI Kota Pasuruan masuk dalam kategori menengah ke atas yang mana berada pada peringkat 10 teratas. Apabila dilihat dari komponen pembentuk I-HDI, pada dimensi *an-nasl* Kota Pasuruan menunjukkan angka yang rendah, hal tersebut disebabkan karena angka kelahiran yang telah disesuaikan dengan persentase angka kematian di kota tersebut berada pada peringkat terendah. Berdasarkan hal ini, dengan kecilnya angka *ndex an-Nasl* berpengaruh pada turunnya posisi pembangunan Kota Pasuruan ke status pembangunan rendah.

Daerah lain yang termasuk dalam kategori ini adalah Kabupaten Situbondo. Jika dilihat dari komponen pembentukan I-HDI, indeks kedalaman kemiskinan kota tersebut selalu berada pada peringkat 12 teratas. Pengeluaran per kapitanya juga selalu berada peringkat terendah.

4.3.1.1. Disparitas Pembangunan Manusia



Sumber: Hasil perhitungan I-HDI

Gambar 4.2
Pencapaian Pembangunan Manusia berdasarkan I-IHDI di Provinsi
di Jawa Timur 2010-2014

Pencapaian pembangunan manusia di tiap kabupaten/kota yang beragam menunjukkan adanya disparitas, yang mana hal itu disebabkan ketidakmerataan pada berbagai sektor pembangunan tersebut di tiap kabupaten/kota khususnya di Provinsi Jawa Timur. Ketidakmerataan dapat ditinjau melalui beberapa indikator sosial dan ekonomi, adapun indikator sosial dan ekonomi tersebut telah tercakup dalam perhitungan I-HDI.

Seperti dapat dilihat dalam gambar 4.2 di atas, yang merupakan pencapaian pembangunan manusia berdasarkan I-HDI, menunjukkan ketidakmerataan tersebut, sehingga menyebabkan adanya disparitas pencapaian pembangunan di tiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Disparitas pencapaian pembangunan berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat melalui kategori status pencapaian pembangunan masing-masing provinsi dan selisih antara nilai I-HDI tertinggi dengan nilai I-HDI terendah.

Penyebab disparitas pembangunan manusia selain karena ketidakmerataan juga karena adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi menurut Emilia & Imelia adalah sebagai berikut.

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Contohnya seperti ketimpangan pembangunan dalam sektor industri manufaktur atau tingkat industrialisasi antar wilayah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah.

2. Alokasi Investasi

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod Domar menerangkan bahwa adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industri manufaktur.

3. Mobilitas antar faktor produksi yang rendah antar daerah

Salah satu pilar ekonomi liberal adalah kebebasan mobilitas faktor produksi, termasuk faktor buruh dan kapital. Seharusnya birokrasi administratif negara tidak menjadi penghalang mobilitas tersebut agar tidak terjadinya ketimpangan ekonomi regional.

4. Perbedaan SDA antar kabupaten/kota

Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA. Namun, pendapat ini masih bisa dikatakan, dengan catatan SDA dianggap sebagai modal awal untuk pembangunan. Faktanya di Jawa Timur banyak daerah yang kaya akan SDA namun tingkat pembangunan ekonomi masih rendah karena tidak didukung dengan teknologi yang ada.

5. Perbedaan kondisi demografis antar kabupaten/kota

Ketimpangan ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar wilayah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja.

6. Kurang lancarnya perdagangan antar kabupaten/kota

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga menyebabkan ketimpangan ekonomi regional di Jawa Timur. Pada umumnya ketidaklancaran tersebut disebabkan karena keterbatasan transportasi dan komunikasi.

Perdagangan antar kabupaten/kota meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, dan bahan baku untuk keperluan produksi dan jasa. Ketidاكلancaran perdagangan ini mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan lewat sisi permintaan (*Demand*) dan sisi penawaran (*Supply*). Dari sisi permintaan, kelangkaan akan barang dan jasa akan berdampak juga pada permintaan pasar terhadap kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya memperoleh barang modal seperti mesin, dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu provinsi menjadi lumpuh, selanjutnya dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Selain karena adanya ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah, disparitas pembangunan manusia yang terlihat dari hasil pencapaian pembangunan manusia berdasarkan perhitungan I-HDI ini, juga dikarenakan adanya faktor pemenuhan kebutuhan dasar agama dan keturunan yang berbeda-beda tiap kabupaten/kota, yang mana masuk dalam porsi perhitungan I-HDI. Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran dimensi agama salah satunya adanya angka kriminalitas sebagai cerminan terhadap pelaksanaan salah satu ibadah terpenting dalam rukun Islam yaitu Shalat. Hal tersebut tertuang dalam ayat al-Qur'an Ayat al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Utlu mā ūhiya ilayka minal kitābi wa aqimiṣ ṣalāh(ta), innaṣ ṣalāta tanhā ‘anil faḥsyā’i wal munkar(i), wa lazikrullāhi akbar(u), wallāhu ya’lamu mā taṣna’ūn(a).

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dimensi keturunan dibentuk oleh indikator angka kelahiran total yang mana angka kelahiran total ini dapat mencerminkan komitmen yang kuat dalam melanjutkan generasi penerus, yang perlu diingat hal ini harus diikuti dengan kualitas kelahiran yang baik dengan ditandainya angka kematian.

4.3.2. Analisis Perbandingan HDI dan I-HDI di Jawa Timur

Berdasarkan pada hasil perhitungan HDI dan I-HDI pada sub bab 4.2, maka dapat diperoleh perbandingan sebagai berikut.

1. Sebaran nilai I-HDI lebih beragam dibanding HDI

Hasil perhitungan I-HDI dan HDI menunjukkan adanya perbedaan sebaran nilai, yang mana sebaran nilai I-HDI lebih beragam dibandingkan HDI. Perbedaan tersebut terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.19
Perbedaan Sebaran Nilai I-HDI dan HDI

Tahun	Perbedaan Sebaran Nilai	
	I-HDI	HDI
2010	90,0635-48,3984	77,2-54,49

Sumber: Hasil perbandingan I-HDI dan HDI

Tabel 4.19
Perbedaan Sebaran Nilai I-HDI dan HDI

Tahun	Perbedaan Sebaran Nilai	
	I-HDI	HDI
2011	82,4278-52,7020	77,62-55,17
2012	85,90-52,422	78,05-55,78
2013	82,7949-49,5685	78,51-56,45
2014	91,3574-54,1662	78,96-56,98

Sumber: Hasil perbandingan I-HDI dan HDI

Berdasarkan temuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa I-HDI lebih dapat menjelaskan keadaan obyek yang sesungguhnya dari pada HDI.

2. Nilai I-HDI menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota lebih besar daripada HDI

Hal tersebut dapat diketahui dari selisih antara nilai I-HDI tertinggi dengan terendah. Berdasarkan dari perhitungan I-HDI, selisih nilai tersebut terangkup pada tabel 4.20 berikut ini.

Tabel 4.20
Perbedaan Selisih Nilai Tertinggi dengan Nilai Terendah I-HDI dan HDI

Tahun	Selisih Nilai Tertinggi dengan Nilai Terendah I-HDI dan HDI	
2010	41,66 poin	22,71 poin
2011	22,72 poin	22,45 poin
2012	33,48 poin	22,27 poin
2013	33,22 poin	22,06 poin
2014	37,19 poin	21,98 poin

Sumber: Hasil perbandingan I-HDI dan HDI

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap selisih nilai antara I-HDI tertinggi dan terendah dari hasil perhitungan HDI yang berkisar pada angka 22 poin saja. Hal ini juga

menjelaskan bahwa adanya disparitas antar kabupaten/kota di Jawa Timur lebih terlihat jika di lihat dari perhitungan I-HDI.

3. Perbedaan ranking antar I-HDI dan HDI

Perbedaan ranking dari tiap-tiap kabupaten/kota dapat diketahui dari hasil perhitungan HDI dan I-HDI, yang mana dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan beberapa kabupaten/kota dari perhitungan HDI berada pada peringkat atas namun pada hasil perhitungan I-HDI berada pada peringkat bawah. Contohnya pada Kota Malang, yang mana dalam perhitungan HDI berada pada peringkat dua teratas, namun pada perhitungan I-HDI berada pada peringkat lima terbawah, begitu juga dengan kabupaten/kota yang lain.

4. Perbedaan status pembangunan

Tabel 4.21
Status HDI dan I-HDI menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2010-2014

Status Pembangunan	HDI					I-HDI				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
	Jumlah Kota/Kabupaten					Jumlah Kota/Kabupaten				
Tinggi (HDI > 80)	0	0	0	0	0	2	4	4	1	3
Menengah Atas (66 < HDI < 80)	16	18	23	23	24	19	12	14	8	16
Menengah Bawah (50 < HDI < 66)	22	20	15	15	14	15	22	20	28	19
Rendah (HDI < 50)	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0

Sumber: Hasil Perbandingan Status HDI dan I-HDI

Berdasarkan pada tabel 4.21 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada status pembangunan yang diukur dengan skala internasional, dari hasil perhitungan I-HDI dan HDI. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa status pembangunan dari hasil perhitungan HDI

sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status menengah atas, sedangkan dari hasil perhitungan I-HDI sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status pembangunan menengah ke bawah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang sudah di jelaskan, maka simpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil dari pencapaian pembangunan manusia berdasarkan perhitungan I-HDI pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2010-2014, dan diukur dengan skala internasional, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk dalam ketegori status pembangunan menengah ke bawah dengan skala ($50 < I-HDI < 66$) yang mana Kabupaten Malang merupakan daerah yang selalu berada pada kategori tinggi, sedangkan Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Situbondo menjadi daerah dengan kategori rendah . Terjadi disparitas yang cukup jauh antara nilai I-HDI tertinggi dengan yang terendah.
2. Perbedaan yang cukup signifikan antara hasil perhitungan I-HDI dan HDI, di lihat dari perbedaan peringkat tiap kabupaten/kota yang mana dalam HDI berada di peringkat atas namun di hasil perhitungan I-HDI berada di peringkat bawah, juga perbedaan status pembangunan yang dicapai, jika dari perhitungan HDI sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status pembangunan menengah atas dengan skala ($66 < HDI < 80$), sedangkan dari hasil perhitungan I-HDI masuk dalam ketegori status pembangunan menengah bawah dengan skala ($50 < I-HDI < 66$).

5.2. Saran

Berikut beberapa saran yang diajukan dari hasil penelitian ini.

Bagi Peneliti selanjutnya:

1. Memperbarui kualitas indikator yang digunakan untuk mengukur I-HDI untuk tiap dimensi yang sekiranya mampu mencerminkan dan menjelaskan esensi dari *maqashid syariah*. Terutama untuk indikator pada dimensi *ad-Dien* contohnya seperti jumlah muzakki sebagai cerminan rukun Islam ketiga dan jumlah jemaah haji sebagai cerminan rukun islam kelima.
2. Melihat pengaruh dari pembangunan manusia yang diukur melalui I-HDI terhadap faktor-faktor pertumbuhan ekonomi.

Bagi Pemerintah:

3. Mengurangi disparitas yang terjadi di Jawa Timur dengan cara eksplorasi potensi kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih rendah dalam pencapaian pembangunannya secara meterial dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada dengan pemenuhan fasilitas teknologi yang memadai, sedangkan secara non material peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.